



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 42 Bandar Seri Bentan 29133
Telepon (0771) 8080012 Pos-el bkpsdm@bintankab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 5/810.16/XII/2024

TENTANG

**PENYAMPAIAN MATERI POKOK SOAL
SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS DENGAN CAT PENGADAAN PPPK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Menindaklanjuti surat Plt. Sekretaris Kementerian PANRB nomor B/5767/M.SM.01.00/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Teknis dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap PPPK wajib memiliki kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dan kompetensi teknis yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan;
2. Panselnas memandang perlu adanya penyampaian materi pokok soal seleksi kompetensi teknis agar para peserta seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 dapat mengenali poin penting dari soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya (terlampir);
3. Materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan untuk jabatan pelaksana disusun oleh instansi teknis jabatan pelaksana.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bandar Seri Bentan, 2 Desember 2024

Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bintan



Drs. Edi Yusri
Pembina Utama Muda
NIP 196711081990021004



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/5767/M.SM.01.00/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Teknis dengan
CAT untuk Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran
2024

29 November 2024

Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah
- di
Tempat

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang profesional, kompeten, dan melayani, maka setiap PPPK wajib memiliki kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan. Sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, maka setelah seleksi administrasi berakhir, tahap seleksi pengadaan PPPK selanjutnya adalah seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi PPPK terdiri dari Seleksi Kompetensi Manajerial, Seleksi Kompetensi Sosial Kultural, Seleksi Kompetensi Teknis, dan Wawancara Berbasis Komputer.

Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu adanya penyampaian Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Teknis agar para peserta seleksi PPPK TA. 2024 dapat mengenali poin penting dari soal Seleksi Kompetensi Teknis dengan CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Panselnas memberikan Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Teknis dengan CAT untuk jabatan fungsional yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan untuk jabatan pelaksana yang disusun oleh instansi teknis jabatan pelaksana. Untuk selanjutnya, Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Teknis tersebut dapat disebarluaskan melalui situs resmi instansi.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**A.N MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,
PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan

1. Menteri PANRB;
2. Kepala BKN.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

DAFTAR MATERI POKOK SOAL SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS PPPK 2024

NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
1	Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama	Pengetahuan Umum:
		1 Materi umum terkait Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat, Dasar Negara, dan Undang-Undang Dasar
		2 Materi tentang Pemerintahan Pusat-Daerah, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat Umum
		3 Materi tentang Pengetahuan Komputer yang bersifat umum
		Pengetahuan Khusus:
		1 Materi khusus terkait Administrasi Kependudukan yang bersifat khusus
		2 Materi tentang Pencatatan Sipil yang bersifat khusus
		3 Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database
2	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Peraturan-Peraturan mengenai Kepegawaian dan Jabatan fungsional
		2 Peraturan-peraturan Bidang Kesehatan
		3 Pengetahuan Tata Kelola Bidang Kesehatan
		4 Pengetahuan Tata Kelola Bidang Kesehatan
		5 Pengetahuan Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan
		6 Pengetahuan Jafung Adminkes
		Kemampuan Khusus:
		1 Pelayanan Administrasi Kebijakan Program Pembangunan Kesehatan
		2 Analisis administrasi dan kebijakan kesehatan dalam program pembangunan kesehatan
		3 Perizinan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pemberi Jasa Kesehatan
		4 Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		5 Sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terkait bidang kesehatan
3	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Penyusunan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif
		2 Advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif
		Kemampuan Khusus:
		1 Tata kelola kerja sama dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif
		2 Tata kelola pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif
		3 Tata kelola destinasi dan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif
		4 Tata kelola pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif
		5 Tata kelola pembangunan industri serta hak kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
		6 Tata kelola penguatan ekonomi kreatif serta pengembangan ekonomi digital di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
4	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Pedoman dan aturan tentang pembudidayaan ikan
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan perikanan budidaya
		2 Pengelolaan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut
		3 Identifikasi, inventarisasi dan analisis data proses produksi dan sertifikasi bidang perikanan budidaya
		4 Identifikasi, inventarisasi, dan analisis data pakan ikan
		5 Perlindungan Pelaku Utama sektor Kelautan dan Perikanan dan Usaha Perikanan
6 Pengelolaan Usaha Perikanan budidaya		
5	Analisis Data Ilmiah Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Pengenalan ilmu data dalam Analisis Data Ilmiah
		2 Penelusuran dan pengelolaan data dan informasi ilmiah
		3 Rancangan kerja Analisis Data Ilmiah
		Kompetensi Khusus:
		1 Pengumpulan dan persiapan data
		2 Manajemen data
3 Basis data		
4 Data mining		
5 Analisis dan interpretasi data		
6	Analisis Hukum Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Hukum Pidana
		2 Hukum Perdata
		3 Hukum Acara

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		4 Hukum Tata Negara
		5 Hukum Internasional
		6 Hukum Administrasi Negara
		Kemampuan Khusus:
		1 Data dan bahan terkait pemantauan dan peninjauan, serta analisis dan evaluasi terhadap permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis serta kebutuhan peraturan perundang-undangan
		2 Data dan bahan terkait penyelesaian permasalahan hukum dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi Pemerintah
		3 Data dan bahan terkait penyusunan/evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah
		4 Data dan bahan terkait pengelolaan dan pengembangan informasi hukum
		5 Data dan bahan terkait pelaksanaan pelayanan hukum dan perizinan
		6 Data dan bahan terkait pelaksanaan advokasi hukum dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum diluar persidangan (nonlitigasi), pelaksanaan advokasi hukum secara adjudikasi, dan pelaksanaan advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa
7	Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama	1 Identifikasi data dan informasi penyelidikan dan rekomendasi tindakan bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI) dan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), melakukan validasi administratif, dan membuat pemberitahuan publik terkait pelaksanaan penyelidikan tindakan anti dumping, anti subsidi dan pengamanan perdagangan
		2 Analisis data dan informasi dokumen inisiasi/petisi penyelidikan dalam kerangka penanganan tuduhan dumping/subsidi/safeguard dari otoritas negara mitra dagang dan menyajikan bahan serta menyusun laporan berkala perkembangan masalah hambatan
		3 Analisis dan penyusunan bahan terkait pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional
		4 Penyiapan bahan terkait isu yang relevan dengan penguasaan substansi bidang perdagangan di kawasan atau negara mitra dagang
		5 Analisis terhadap permasalahan, dokumen-dokumen perjanjian, dan bukti dukung pelaksanaan perjanjian internasional
		6 Advokasi kebijakan dan monitoring dan evaluasi hasil advokasi
8	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Pembagian wewenang penyelenggaraan sub urusan kebakaran berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 dan Permendagri No 16 Tahun 2020, PP No 16 Tahun 2021, dan Permen PU No 25 Tahun 2008, dan Permen PU No 26 Tahun 2008
		2 Teori Segitiga Api
		3 Sarana Prasarana Pemeriksaan Gedung dan Kebutuhan Perlengkapan dalam pelaksanaan penyuluhan
		Kompetensi Khusus:
		1 Sistem Pipa Tegak
		2 Sistem Sprinkler Otomatis
		3 Pompa Pemadam Kebakaran
		4 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
		5 Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran
		6 Ventilasi Mekanik dan Sistem Pengendalian Asap
		7 Pasangan Konstruksi Tahan Api
		8 Partisi Penghalang Asap
		9 Bahan Pelapis Interior
		10 Sarana Jalan Keluar
		11 Pencahayaan Darurat
		12 Teknik Dasar Penyuluhan
9	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Konsep Dasar Penanggulangan Bencana
		Kemampuan Khusus:
		1 Kesiapsiagaan Bencana
		2 Mitigasi Bencana
		3 Peringatan Dini Bencana
		4 Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian, dan sumber daya
		5 Langkah dan tata cara dalam pelaksanaan kaji cepat
		6 Pengkajian informasi awal dalam kaji cepat
		7 Metode dan pengolahan data kaji cepat
		8 Penentuan status keadaan darurat bencana
		9 Peran pemerintah dalam penanggulangan bencana
		10 Analisis penanganan korban dan pengungsi saat status tanggap darurat
		11 Analisis kebutuhan dasar korban dan pengungsi saat status tanggap darurat
		12 Rencana operasi penanganan darurat
		13 Pengendalian operasi/komando penanganan
		14 Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		15 Pemenuhan kebutuhan dasar
		16 Perlindungan terhadap kelompok rentan
		17 Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
		18 Fasilitasi penanganan korban dan pengungsi bencana
		19 Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
		20 Pemulihan dan peningkatan fisik pasca bencana
		21 Pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi dan sumber daya alam pasca bencana
		22 Pengelolaan logistik dan peralatan kebencanaan
		23 Optimasi jaringan logistik dan peralatan kebencanaan
		24 Pengurangan risiko bencana
10	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Kemampuan Analisis:
		1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
		2 Manajemen Kebijakan Publik
		3 Metodologi Riset Kebijakan
		4 Analisis Kebijakan Publik
		5 Dokumentasi Saran Kebijakan
		Kemampuan Politis:
		1 Publikasi Saran Kebijakan
		2 Komunikasi dan Konsultasi Kebijakan
		3 Pemetaan Stakeholder dan Advokasi Kebijakan Publik
11	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	1 Ketersediaan pangan
		2 Stabilisasi pasokan dan harga pangan
		3 Distribusi dan cadangan pangan
		4 Pengendalian kerawanan pangan
		5 Sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG)
		6 Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi
		7 Penganeekaragaman konsumsi pangan
		8 Perumusan standar keamanan dan mutu pangan
		9 Pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan
12	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Undang-undang 31/2004 jo undang-undang 45/2009
		2 UU Cipta Kerja 06 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU
		3 PP 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
		4 UU 18 tahun 2012 tentang Pangan
		5 Permen KP 31 tahun 2023 tentang kemitraan bidang usah KP
		6 Permen 10 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko
		7 PP 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko
		8 PP No 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
		Kemampuan Khusus:
		1 Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan
		2 Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri
		3 Peningkatan Akses Pasar Luar Negeri
		4 Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan
		5 Pemetaan Potensi usaha dan Peluang Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan
		6 Pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan
13	Analisis Pasar Hasil Perikanan Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Undang-undang 31/2004 jo undang-undang 45/2009
		2 UU Cipta Kerja 06 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU
		3 PP 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
		4 UU 18 tahun 2012 tentang Pangan
		5 Permen KP 31 tahun 2023 tentang kemitraan bidang usah KP
		6 Permen 10 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko
		7 PP 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko
		8 PP No 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
		Kemampuan Khusus:
		1 Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan
		2 Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri
		3 Peningkatan Akses Pasar Luar Negeri
		4 Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan
		5 Pemetaan Potensi usaha dan Peluang Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan
		6 Pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan
14	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Regulasi terkait Analisis Pasar Hasil Pertanian
		2 Metode Analisis Data Pemasaran
		3 Perdagangan Internasional

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		4 Kerjasama dan Organisasi Internasional dibidang hasil pertanian 5 Penyebarluasan informasi pemasaran 6 Pengetahuan di Bidang Pertanian dan ekonomi Kompetensi Khusus: 1 Teori dan analisis ekonomi pertanian 2 Teori dan analisis perdagangan internasional 3 Usahatani
15	Analisis Pasar Hasil Pertanian Terampil	Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan umum di bidang pertanian 2 Pengetahuan umum terkait pemasaran pertanian 3 Regulasi terkait Analisis Pasar Hasil Pertanian Kompetensi Khusus: 1 Pengumpulan dan analisis data analisis pasar hasil pertanian 2 Ilmu Dasar Sosial Ekonomi Pertanian 3 Sarana Pasar dan Kelembagaan 4 Kebijakan Pasar Hasil Pertanian
16	Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Perencanaan Iptek 2 Pemanfaatan Iptek 3 Manajemen Kekayaan Intelektual 4 Alih Teknologi Kompetensi Khusus: 1 Intermediasi Iptek 2 Difusi Iptek 3 Komersialisasi Teknologi
17	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundangundangan terkait Penyelenggaraan KPBU 2 Kebijakan/Peraturan Perundangundangan terkait Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan Kompetensi Khusus: 1 Perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan 2 Penyiapan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan 3 Pelaksanaan dan/atau transaksi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan 4 Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
18	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama	1 Kebijakan tentang Pengembangan Kompetensi ASN 2 Manajemen ASN 3 Manajemen Kinerja 4 Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 5 Standar Kompetensi Jabatan ASN 6 Pengembangan Kompetensi Non Klasikal 7 ASN Corporate University (Corpu) 8 Manajemen Talenta 9 Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi 10 Evaluasi pelaksanaan Bangkom ASN
19	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	Kemampuan Umum: Undang Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan menteri terkait sektor kelautan dan perikanan Kemampuan Khusus: 1 Pemanfaatan air laut 2 Pemanfaatan pasir laut 3 Pemanfaatan biomorfologi 4 Pengelolaan kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil 5 Penataan bangunan dan instalasi bawa laut 6 Pengelolaan benda muatan kapal tenggelam (BMKT) 7 Perencanaan pengembangan dan pengelolaan wisata bahari 8 Perencanaan pengembangan dan pengelolaan wisata bahari berbasis ekosistem mangrove
20	Analisis Perdagangan Ahli Pertama	1 Penyajian data dan informasi perdagangan serta penjelasan terkait data dan informasi perdagangan yang menjadi kewenangannya 2 Analisis data dan informasi yang digunakan untuk pengelolaan ekspor dan impor meliputi perhitungan alokasi ekspor/impor, permasalahan teknis serta faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan oengelolaan ekpor impor dan fasilitasi sarana perdagangan 3 Analisis kelayakan terhadap usulan penerbitan dokumen perizinan/non perizinan bidang perdagangan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis 4 Pemantauan dan analisis data dan informasi hasil pemantauan harga dan pasokan/stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, dan analisis terkait jaringan distribusi, sarana perdagangan dan logistik serta verifikasi data harga dan stok/pasokan barang tertentu pokok dan barang penting

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		5 Analisis bahan rencana pelaksanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan konsumen dan pembinaan pelaku usaha
		6 Analisis bahan terkait penyelenggaraan promosi perdagangan dan menyiapkan penyelenggaraan promosi perdagangan
21	Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Konsep kebun raya dan konservasi
		2 Pengembangan koleksi tumbuhan
		3 Pengembangan kawasan kebun raya
		4 Identifikasi tumbuhan
		Kompetensi Khusus:
		1 Lanskap kebun
		2 Penulisan ilmiah
		3 Database koleksi
		4 Pengolahan data
		5 Penyiapan sarana prasarana
		6 Perawatan koleksi
22	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Regulasi Bidang Irigasi Pertanian
		2 Regulasi terkait pendaftaran di bidang pestisida, pendaftaran pupuk, pengawasan pupuk dan pupuk bersubsidi
		3 Regulasi dan pengetahuan umum bidang asuransi pertanian dan penyaluran tanggung jawab sosial lingkungan
		4 Pengantar ilmu usahatani dan agribisnis
		5 Pengantar bisnis perbankan (konsep bisnis meliputi pengertian, aspek manajemen, fungsi dan lingkungan yang mempengaruhi iklim bisnis perbankan di Indonesia)
		6 Pengantar ilmu tanah
		7 Makroekonomi
		8 Regulasi bidang koperasi, lembaga keuangan mikro, UMKM
		9 Pengetahuan tentang koperasi, lembaga keuangan mikro, otoritas jasa keuangan, UMKM, ekonomi mikro dan pertanian
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengetahuan iklim (cuaca, fenomena, anomali, regulasi, perhitungan)
		2 Pengetahuan irigasi pertanian (P3A, jaringan irigasi, saluran, bendung/dam parit/embung, air tanah/permukaan)
		3 Perhitungan irigasi pertanian (volume, debit, luas layanan)
		4 Pengetahuan tentang organisme pengganggu tanaman, pengetahuan umum tentang pupuk dan pestisida, manfaat pupuk anorganik, pupuk organik dan pembenah tanah bagi tanaman dan pupuk bersubsidi
		5 Perhitungan dan mekanisme klaim asuransi pertanian
		6 Dasar agronomi
		7 Regulasi bidang koperasi dan lembaga keuangan mikro
		8 Pengetahuan tentang lembaga keuangan mikro, PUAP, LKM-A dan UMKM
		9 Pengetahuan budidaya pertanian
		10 Pengetahuan dasar-dasar ilmu tanah
		11 Pengetahuan dasar-dasar pemetaan dan penginderaan jauh
		12 Pengetahuan sistem informasi geografis
23	Analisis Standardisasi Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Pembinaan penerapan kebijakan standarisasi dan penilaian kesesuaian
		2 Pemantauan dan evaluasi bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian berdasarkan substansi teknis pada instansi/unit penempatan
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengembangan standar
		2 Penerapan standar dan penilaian kesesuaian
		3 Pengelolaan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian
24	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		3 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017
		4 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
		5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
		Kemampuan Khusus:
		1 Jabatan Fungsional Analisis SDM Aparatur
		2 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN
		3 Pengadaan ASN
		4 Pangkat dan Jabatan ASN
		5 Pengembangan Karier ASN
		6 Pola Karier ASN
		7 Promosi ASN
		8 Mutasi ASN

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		9 Penugasan ASN
		10 Pengembangan Kompetensi ASN
		11 Penilaian Kinerja ASN
		12 Disiplin ASN
		13 Penghargaan ASN
		14 Penggajian, Tunjangan, dan Fasilitas ASN
		15 Pemberhentian ASN
		16 Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN
		17 Perlindungan ASN
		18 Cuti ASN
		19 Sistem Informasi ASN
		20 Talenta/reformasi birokrasi/zona integritas
		21 Struktur/kelembagaan/tata laksana/ proses bisnis unit kerja/instansi
		22 Kelembagaan ASN dan/atau lembaga pengelola kepegawaian dengan unit kerja dalam penguatan efektivitas organisasi
		23 Proses penyusunan kebijakan/regulasi bidang SDM Aparatur
25	Apoteker Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		2 Kepmenkes No 13 tahun 2023 tentang Standar Profesi Apoteker
		3 Permenkes No 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
		4 Permenkes No 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
		5 Kode Etik Apoteker
		Kemampuan Khusus:
		1 Penyusunan Rencana Praktik Kefarmasian
		2 Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP
		3 Pelayanan Farmasi Klinik
		4 Pelayanan Farmasi Khusus
		5 Penerapan Farmakoekonomi
26	Arsiparis Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Sejarah, konsep dan teori dasar kearsipan
		2 Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang kearsipan
		3 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
		4 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
		Kemampuan Khusus:
		1 Konsep dan teori tentang arsip dinamis
		2 Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Arsip Dinamis
		3 Konsep dasar penyusutan arsip
		4 Pemusnahan arsip dinamis dan penyerahan statis ke lembaga kearsipan
		5 Konsep dan teori tentang arsip statis
		6 Peraturan Perundang-undangan tentang arsip statis
		7 Preservasi arsip statis
		8 Layanan dan Pemanfaatan Arsip Statis
		9 Standar Operasional Prosedur Kearsipan
		10 Penilaian kinerja Arsiparis
		11 Identifikasi dan pengolahan data arsip untuk SIKN
27	Arsiparis Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Konsep dan teori tentang kearsipan
		2 Peraturan Perundang-undangan di bidang kearsipan
		Kemampuan Khusus:
		1 Teori dasar pengelolaan arsip dinamis
		2 Peraturan perundangan terkait pengelolaan arsip dinamis
		3 Penciptaan arsip
		4 Pemberkasan arsip aktif
		5 Penataan arsip inaktif
		6 Teori dasar pengelolaan arsip statis
		7 Peraturan perundangan terkait pengelolaan arsip statis
		8 Restorasi arsip
		9 Pameran arsip
		10 Teori dasar pembinaan kearsipan
		11 Peraturan perundangan dalam rangka pembinaan kearsipan
		12 Bimbingan teknis kearsipan
28	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Industri , konsumen, masyarakat dan pasar global
		2 Sertifikasi produk dan perbedaan dengan jenis lainnya
		3 Tugas fungsi Asesor Manajemen Mutu Industri
		4 Tugas fungsi dan persyaratan lembaga sertifikasi produk
		5 Konsep sistem industri manufaktur
		6 Regulasi dan kebijakan industri terkait standardisasi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		7 Prinsip-prinsip standardisasi, tujuan dan manfaat standar serta Standar Nasional Indonesia (SNI)
		Kemampuan Khusus:
		1 Tujuan, manfaat dan penerapan akreditasi di LPK, dan stakeholder akreditasi
		2 Proses Sertifikasi Produk, persyaratan dan skema lembaga sertifikasi produk
		3 Tujuan dan metoda evaluasi: asesmen, inspeksi, verifikasi, kalibrasi dan pengujian
		4 Metode dan teknik persiapan dan Pelaksanaan Asesmen untuk penerapan Sistem Manajemen Mutu di Industri
		5 Persyaratan sistem manajemen mutu serta bukti penerapan di industri
		6 Aspek-aspek yang mendukung kompetensi atribut dan personil Lembaga Sertifikasi produk
		7 Jenis-jenis skema sertifikasi, fungsi, tahapan-tahapan dalam skema sertifikasi dan contoh penerapannya
		8 Penerapan di lapangan terkait dengan kegiatan-kegiatan sertifikasi pada tahap seleksi, determinasi dan surveilan/pengawasan
		9 Aspek penting dalam kajian laporan uji dan laporan asesmen sesuai skema sertifikasi
		10 Analisis Studi Kasus dalam Asesmen Kesesuaian
29	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		3 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017
		4 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
		5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
		Kemampuan Khusus:
		1 Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur
		2 Kerangka Kerja dan Implementasi Manajemen SDM berbasis Kompetensi
		3 Kerangka Kerja dan Implementasi Manajemen SDM berbasis Talenta
		4 Proses dan Pengelolaan Asesmen Kompetensi/Potensi ASN
		5 Kerangka Kerja Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Asesmen
		6 Kerangka Kerja Pengembangan Strategik Asesmen
30	Asisten Apoteker Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Pemilihan peralatan menimbang bahan baku
		2 Jenis timbangan
		3 Peraturan Perundang-undangan dibidang kefarmasian
		4 Penandaan atau pelabelan di dalam sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan
		5 Promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif
		6 Jenis imunisasi
		7 Jenis sediaan farmasi
		8 Alat Pelindung Diri
		9 Jenis sediaan obat tradisional
		Kemampuan Khusus:
		1 Efek Samping Obat
		2 Informasi cara pakai sediaan farmasi, alkes, dan BMHP
		3 Informasi terkait kontraindikasi obat
		4 Informasi indikasi sediaan farmasi, alkes, dan BMHP
		5 Analgetik
		6 Obat kardiovaskuler
		7 Antihiperlipidemia
		8 Obat saluran cerna
		9 Obat hipersekresi asam lambung
		10 Vitamin dan mineral
		11 Antidiabetik
		12 Antimikroba
		13 Antihistamin
		14 Peracikan obat
		15 Etiket dan Label pada sediaan farmasi
		16 Pelayanan alat kesehatan
		17 Pelayanan obat bebas dan bebas terbatas
		18 Swamedikasi
		19 Perhitungan Dosis, Biaya dan kebutuhan bahan dalam resep
		20 Jenis kegiatan pelayanan farmasi klinik.
		21 Pengkajian resep berdasarkan administratif dan farmasetik
		22 Identifikasi zat aktif obat dari berbagai bentuk kombinasi sediaan obat
		23 Identifikasi kualitas obat dengan pertimbangan kondisi fisik obat, sifat organoleptis, dan tanggal ED/BUD
		24 Pendistribusian/Penyaluran Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
		25 Pemusnahan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan sesuai dengan karakteristik dan perundang undangan
		26 Perhitungan kebutuhan formula standar

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		27 Jenis basis sediaan semisolid
		28 Fungsi bahan tambahan dalam sediaan farmasi
		29 Pemeriksaan Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
		30 Penandaan dan penyimpanan sediaan farmasi critical, High Alert Medication (HAM), radiofarmaka dan kelompok Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
		31 Penyimpanan narkotika, psikotropika dan precursor farmasi)
		32 Penyimpanan sediaan farmasi dan alat Kesehatan sesuai karakteristik, mutu dan stabilitas
		33 Penerimaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
		34 Konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara penyusunan rencana praktik kefarmasian.
		35 Langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan rencana praktik kefarmasian
31	Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Regulasi Nasional dan Internasional tentang Penerbangan Sipil
		2 Tugas, tanggung jawab dan kompetensi Asisten Inspektur Kelaikudaraan
		3 Hukum penerbangan sipil Internasional
		4 Dasar peraturan penerbangan sipil internasional (ICAO Doc & Annexes)
		Kemampuan Khusus:
		1 Proses Sertifikasi Kecakapan Personil - Pemeriksaan kelengkapan dokumen peserta ujian, pengawasan ujian tertulis dan koreksi hasil ujian bagi personil lisensi
		2 Proses Sertifikasi Kecakapan Personil - Proses pemeriksaan kelengkapan dokumen penerbitan lisensi personel teknik pesawat udara
		3 Proses Sertifikasi Kecakapan Personil - Proses pemeriksaan dokumen pengajuan penerbitan certificate of maintenance approval (COMA)
		4 Proses Sertifikasi Kecakapan Personil - Proses pemeriksaan dokumen pengajuan penambahan kemampuan/rating COMA (certificate of maintenance approval)
		5 Proses Sertifikasi Kecakapan Personil - Proses pemeriksaan dokumen pengajuan penambahan kemampuan/rating license
		6 Prosedur Perwakilan Regulator sebagai Penguji - Proses pemeriksaan dokumen permohonan DAMEER (administration of designated aircraft maintenance engineer examiner representatives)
		7 Prosedur Perwakilan Regulator sebagai Penguji - Proses pengawasan ujian tes tulis pada pemohon DAMEER (administration of designated aircraft maintenance engineer examiner representatives)
		8 Prosedur Perwakilan Regulator sebagai Penguji - Proses pemeriksaan dokumen perpanjangan DAMEER (administration of designated aircraft maintenance engineer examiner representatives)
		9 Proses Sertifikasi Pesawat - Proses pemeriksaan kelaikudaraan pesawat udara kategorin normal untuk penerbitan sertifikat kelaikudaraan standard (standard C of A)
		10 Proses Sertifikasi Pesawat - Proses pemeriksaan kelaikudaraan pesawat udara kategorin normal untuk penerbitan sertifikat kelaikudaraan khusus (special C of A)
		11 Proses Sertifikasi Pesawat - Proses surat hasil pemeriksaan kelaikudaraan pesawat udara
		12 Proses Sertifikasi Operator Pesawat Proses pelaksanaan safety management system (SMS)
		13 Safety Management System (SMS)
		14 Proses Sertifikasi Operator Pesawat - Proses audit sebagai anggota audit
		15 Proses Sertifikasi Operator Pesawat - Proses pemeriksaan berkala safety management system (SMS)
		16 Prosedur Audit dan Surveillance AOC - Proses ramp inspection pesawat udara
		17 Proses Audit dan Surveillance AOC - Proses pemeriksaan fasilitas perawatan
		18 Prosedur Audit dan Surveillance AOC - Proses pemeriksaan perawatan pesawat udara (spot inspection)
		19 Prosedur Audit dan Surveillance AOC - Proses pemeriksaan weight & balance program
		20 Prosedur Audit dan Surveillance AMO - Proses pemeriksaan publikasi perawatan pesawat udara
		21 Prosedur Audit dan Surveillance AMO - Proses pemeriksaan pelaksanaan edaran kelaikudaraan (AD)
32	Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan pemerintah No. 32 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang penerbangan
		2 ICAO Annexes
		3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan
		Kemampuan Khusus:
		1 Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara
		2 PM 28 tahun 2013 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 121 tentang persyaratan sertifikasi dan operasi bagi perusahaan angkutan udara yang melakukan penerbangan dalam negeri, internasional dan angkutan udara niaga tidak berjadwal
		3 PM 33 tahun 2022 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 119 tentang sertifikasi pengoperasian pesawat udara

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		4 Peraturan direktur jenderal perhubungan udara nomor 184 tahun 2021 tentang perubahan KP 244 tahun 2017 tentang petunjuk teknis peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 8900-5.2 tentang prosedur sertifikasi personel dan tugas dan tanggung jawab inspektur operasi penerbangan
		5 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 263 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-6.3 (Staff Instruction 8900-6.3) tentang Prosedur Audit dan Surveilans bagi Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (Auditing and Surveillance Procedures for Air Operator Certificate)
33	Asisten Konselor Adiksi Terampil	Kompetensi Umum:
		1 Regulasi nasional dan internasional tentang rehabilitasi GPN
		2 Pengetahuan adiksi narkoba
		3 Pengetahuan tentang komunikasi efektif di bidang P4GN
		Kompetensi Khusus:
		1 Penyiapan skrining
		2 Asistensi orientasi layanan rehabilitasi
		3 Penyiapan asesmen
		4 Penyiapan rencana rawatan
		5 Asistensi konseling
		6 Asistensi pendampingan
		7 Asistensi manajemen kasus
		8 Asistensi penanganan kasus
		9 Asistensi edukasi
		10 Penyiapan rujukan
		11 Penyiapan konsultasi
34	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil	Kemampuan Umum:
		Peraturan terkait pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengembangan usaha dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan
		2 Perumusan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
		3 Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
		4 Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan
		5 Uji terap teknik produk kelautan dan perikanan
		6 Pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan
35	Asisten Penata Anestesi Terampil	Kemampuan Umum:
		Kepmenkes HK-01.07/MENKES/722/2020 tentang Standar Kompetensi Penata Anestesi
		Kemampuan Khusus:
		1 Kepmenkes HK-01.07/MENKES/722/2020 tentang Standar Kompetensi Penata Anestesi
		2 Permenpan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Penata Anestesi
		3 Permenkes Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pekerjaan Penata Anestesi
36	Asisten Pengawas Perikanan Pemula	Kemampuan Umum:
		Peraturan Kelautan dan Perikanan
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengetahuan dan pemahaman konsep dasar pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan
		2 Pengelolaan Sistem Pemantauan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
		3 Pemahaman konsep dasar penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan
		4 Pemahaman konsep dasar dan proses pengoperasian armada pengawasan
		5 Pengawakan Armada Kapal Pengawas
37	Asisten Pengawas Perikanan Terampil	Kemampuan Umum:
		Peraturan Kelautan dan Perikanan
		Kemampuan Khusus:
		1 Penyusunan dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan
		2 Pemahaman konsep dasar, proses pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
		3 Pemahaman konsep dasar penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan
		4 Pemahaman konsep dasar dan proses pengoperasian armada pengawasan
		5 Pengawakan Armada Kapal Pengawas
38	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula	Kemampuan Umum:
		Peraturan tentang pelayanan jasa di pelabuhan perikanan
		Kemampuan Khusus:
		1 Pemantauan jenis ikan hasil tangkapan
		2 Identifikasi jenis - jenis kapal penangkapan ikan
		3 Tata kelola pengawakan kapal perikanan
		4 Identifikasi jenis mesin dan alat penangkapan ikan
		5 Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan
		6 Perizinan Usaha Perikanan dan Kenelayanan
39	Asisten Pengelola Produksi	Kemampuan Umum:

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
	Perikanan Tangkap Terampil	Peraturan tentang kebijakan perikanan tangkap Kemampuan Khusus: 1 Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumberdaya Ikan 2 Identifikasi komponen pemeriksaan kapal perikanan 3 Perlindungan, Standardisasi dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan 4 Identifikasi komponen pemeriksaan mesin dan alat penangkapan ikan 5 Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan 6 Perizinan Usaha Perikanan dan Kenelayanan
40	Asisten Penyuluh Perikanan Terampil	Kemampuan Umum: 1 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi 45 Tahun 2009 2 UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 3 UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan Kemampuan Khusus: 1 Pengolahan data dan informasi kelembagaan sektor kelautan dan perikanan 2 Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan sektor kelautan dan perikanan 3 Materi Penyuluhan dalam berbagai media 4 Penyusunan dan Penerapan Metoda dan Materi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 5 Kemitraan Usaha Kelautan dan Perikanan 6 Peningkatan produktivitas dan skala usaha Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha Perikanan
41	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	Kemampuan Umum: 1 Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia 2 Manajemen ASN dan Pembentukan Undang-Undang Kemampuan Khusus: 1 Kelembagaan DPR 2 JF PL Ahli Pertama/JF APL Terampil dan Penulisan sesuai PUEBI 3 Instansi Pembina dan Instansi Pengguna JFPL/JFAPL
42	Asisten Perpustakaan Terampil	Kemampuan Khusus: 1 Pengelolaa teknis bahan perpustakaan 2 Pelayanan dasar perpustakaan Kemampuan Umum: 1 Pembudayaan kegemaran membaca 2 Sejarah dunia kepustakawanan
43	Asisten Pranata Siaran Pemula	Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 2 PP Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik 3 Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang P3SPS 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 5 Kode Etik Jurnalistik Nomor 6 Tahun 2008 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Kemampuan Khusus: 1 Prinsip Komunikasi 2 Dasar Jurnalistik 3 Berita 4 Wawancara 5 Produksi Siaran 6 Program Siaran 7 Animasi 8 Desain Komunikasi Visual 9 Videografi 10 Komunikasi Massa 11 Agenda Setting 12 Program Pemberitaan 13 Penulisan Naskah (Jurnalistik dan Artistik) 14 Profesi Siaran 15 Proses Produksi Siaran 16 Sosial Media 17 Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)
44	Asisten Statistisi Terampil	Kemampuan Umum: 1 Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Statistik Nasional (SSN) Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan dasar statistik: Data, kegunaan statistik dan statistika 2 Pengumpulan Data 3 Teknik Penyusunan Kuesioner 4 Pengolahan Data 5 Analisis dan Diseminasi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
45	Asisten Teknisi Siaran Pemula	Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
		2 PP Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik
		3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
		4 Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Media Massa
		2 Media Sosial
		3 Internet
		4 Situs Web
		5 Audio-Video
		6 Dasar-dasar Audio Video dan Teknik Studio
		7 Dasar-dasar Kamera Video
		8 Teknik Dasar Kamera
		9 Teknik Dasar dan Seni Produksi Audio Visual
		10 Produksi Siaran
		11 Teori Dasar Tata Cahaya
		12 Dasar-dasar Fotografi
		13 Teknik Dasar Pemancar
		14 Sistem Komputer
		15 Teknik Komputer
		16 Teori Multimedia
		17 Teknik Multimedia
		18 Teknik Dasar Jaringan Komputer
		19 Sistem Televisi
		20 Dasar Teknologi Televisi
21 Teori Dasar Elektronika		
22 Elektronika		
23 Dasar-dasar Listrik		
24 Teknik Dasar Desain Grafis		
25 Perangkat Multimedia		
26 Media Digital		
46	Bidan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Etik legal dan keselamatan pasien
		2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan
		Kemampuan Khusus:
		1 Pelayanan Kesehatan Ibu
		2 Pelayanan Kesehatan Anak
		3 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana
		4 Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam Pelayanan Kebidanan (Communicator)
		5 Pengergerakan Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pelayanan Kebidanan
		47
1 Etik legal dan keselamatan pasien		
2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan		
Kemampuan Khusus:		
1 Pelayanan Kesehatan Ibu		
2 Pelayanan Kesehatan Anak		
3 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana		
4 Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam Pelayanan Kebidanan (Communicator)		
5 Pengelolaan Pelayanan Kebidanan		
48	Dokter Ahli Muda	
		1 SKDI Tahun 2012 (Profesionalitas yang Luhur)
		2 SKDI Tahun 2012 (Mawas Diri dan Pengembangan Diri)
		3 SKDI Tahun 2012 (Komunikasi Efektif)
		4 SKDI Tahun 2012 (Pengelolaan Informasi)
		5 SKDI Tahun 2012 (Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran)
		6 SKDI Tahun 2012 (Keterampilan Klinis)
		7 SKDI Tahun 2012 (Pengelolaan Masalah Kesehatan)
		Kemampuan Khusus:
		1 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pelayanan Spesialistik)
		2 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Tindakan Spesialistik Komplek Tingkat 1)
		3 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Tindakan Spesialistik Medis Konsultan)
		4 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Tindakan Darurat Medis Sedang)
		5 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Visitasi Pasien)
6 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pemulihan Mental Tingkat 1)		

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		7 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pemulihan Fisik Tingkat 1)
		8 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pemeliharaan Kesehatan Ibu)
		9 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pemeliharaan Kesehatan Bayi dan Balita)
		10 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pemeliharaan Kesehatan Anak)
		11 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pelayanan KB)
		12 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pelayanan Imunisasi)
		13 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pelayanan Gizi)
		14 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pengolahan Data)
		15 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Penyuluhan Medis)
		16 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Catatan Medis)
		17 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pemeriksaan Kesehatan Individu)
		18 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Tim Penguji Kesehatan)
		19 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pelayanan Visum et Repertum Komplek Tingkat 1)
		20 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Saksi Ahli)
		21 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pelayanan Otopsi)
		22 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Kaderisasi Masyarakat)
49	Dokter Ahli Pertama	Kompetensi Umum: Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012 Kompetensi Khusus: 1 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 139/KEP/M.PAN/11/2003 2 Standar Kompetensi Dokter 2012
50	Dokter Gigi Ahli Muda	Kemampuan Umum: 1 Regulasi jaminan kesehatan nasional 2 Sustainable Developmental Goals 3 Sistem Kesehatan Nasional 4 UU no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 5 Pelayanan rumah sakit 6 Standard pelayanan minimal rumah sakit 7 Pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit 8 Cara mencegah penyalahgunaan narkoba 9 Patient safety rumah sakit 10 Etika profesi kedokteran gigi 11 Disiplin profesi kedokteran gigi 12 Transformasi kesehatan 13 Komunikasi dokter gigi dengan pasien dan sejawat lain Kemampuan Khusus: 1 Tahap-tahap penegakan diagnosa klinis 2 Tahap evaluasi pengkajian klinis 3 Perencanaan edukasi atau promosi kesehatan pada individu/keluarga/masyarakat 4 Evaluasi pelaksanaan edukasi/promosi kesehatan 5 Penyusunan peta jalan dan koordinasi penatalaksanaan klinis secara holistik dan 6 Cara/metode/alur evaluasi penatalaksanaan klinis holistik dan komprehensif
51	Dokter Gigi Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Undang- Undang Kesehatan, dan peraturan Per Undang-undangan Jaminan Kesehatan Nasional 2 SDGs Bidang Kesehatan 3 Peraturan Presiden no 72 tahun 2012 4 Undang- Undang Kesehatan no 17 tahun 2023. Hukum dan Etika Profesi 5 Permenkes 43 tahun 2019 6 Standar profesi kedokteran gigi sesuai peraturan pemerintah no 2 tahun 2018 7 GERMAS 8 Peraturan perundangan tentang pencegahan narkoba 9 Sistem kesehatan nasional dan 7 sub sistem kesehatan nasional 10 Standar akreditasi nasional Kemampuan Khusus: 1 Penyembuhan Penyakit Gigi dan Mulut 2 Pemulihan Kesehatan Akibat Penyakit Gigi dan Mulut 3 Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit gigi dan mulut 4 Sesuai juknis dari undang-undang kesehatan no 17 tahun 2023 5 Pelayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat
52	Dosen Asisten Ahli	Kompetensi Khusus: Etika dan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Etika, Pendidikan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) Kompetensi Umum: 1 Penalaran dan Pemecahan Masalah (Analytical Thinking, Creative Thinking, Critical Thinking, dan Strategic Thinking) 2 Dimensi Psikologi (Integritas Akademik, Keterampilan Interpersonal, Motivasi Berprestasi, Belajar Berkelanjutan, Kemampuan Sosial, dan Perilaku Kolaboratif)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		3 Bahasa Inggris meliputi teks artikel ilmiah, teks argumentatif, teks pengumuman, dan teks berita
53	Dosen Lektor	Kompetensi Khusus: Etika dan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Etika, Pendidikan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat)
		Kompetensi Umum:
		1 Penalaran dan Pemecahan Masalah (Analytical Thinking, Creative Thinking, Critical Thinking, dan Strategic Thinking)
		2 Dimensi Psikologi (Integritas Akademik, Keterampilan Interpersonal, Motivasi Berprestasi, Belajar Berkelanjutan, Kemampuan Sosial, dan Perilaku Kolaboratif)
		3 Bahasa Inggris meliputi teks artikel ilmiah, teks argumentatif, teks pengumuman, dan teks berita
54	Dosen Lektor Kepala	Kompetensi Khusus: Etika dan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Etika, Pendidikan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat)
		Kompetensi Umum:
		1 Penalaran dan Pemecahan Masalah (Analytical Thinking, Creative Thinking, Critical Thinking, dan Strategic Thinking)
		2 Dimensi Psikologi (Integritas Akademik, Keterampilan Interpersonal, Motivasi Berprestasi, Belajar Berkelanjutan, Kemampuan Sosial, dan Perilaku Kolaboratif)
		3 Bahasa Inggris meliputi teks artikel ilmiah, teks argumentatif, teks pengumuman, dan teks berita
55	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Permenkes No. 2 Tahun 2023 (Bab VI)
		2 Permenpan No. 68 Tahun 2021
		3 Standar Kompetensi Entomolog Kesehatan
		4 Metode Penulisan Karya Tulis Ilmiah
		Kemampuan Khusus:
		1 Rencana kegiatan tahunan di bidang pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit
		2 Survei Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
		3 Investigasi/Penyelidikan Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
		4 Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
		5 Uji kerentanan dan uji efikasi vektor
		6 Pedoman dan petunjuk teknis bidang vektor dan binatang pembawa penyakit
56	Entomolog Kesehatan Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
		2 Permenpan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan
		3 Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
		Kemampuan Khusus:
		1 Permenpan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan
		2 Permenkes RI No. 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesling
		3 Buku Identifikasi nyamuk Anopheles
		4 Buku Identifikasi nyamuk Aedes, Culex dan Mansonia
		5 Pedoman Penggunaan Insektisida/Pestisida
		6 Pedoman Pengendalian Tikus
		7 Pedoman Survei Entomologi
		8 Pedoman Pengendalian Tikus dan Lalat
57	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Komunikasi Efektif
		2 Komunikasi Interpersonal
		3 Advokasi
		4 Pengorganisasian kegiatan epidemiologi
		Kemampuan Khusus:
		1 Manajerial Epidemiologi
		2 Surveilans Epidemiologi
		3 Manajemen Data Epidemiologi
		4 Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB/wabah
		5 Pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini penyakit dan masalah kesehatan
		6 Kajian Epidemiologi
		7 Kewaspadaan Dini KLB
58	Epidemiolog Kesehatan Terampil	Kemampuan Umum:
		1 PMK 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveillance Kesehatan
		2 UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
		3 Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/321/2020 tentang Standar Profesi Epidemiologi Kesehatan
		Kemampuan Khusus:
		1 Langkah-Langkah Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		2 Investigasi Kejadian Luar Biasa/Wabah
		3 Pelaksanaan Surveilans KLB
		4 Monev Program Pengendalian Penyakit di Puskesmas
		5 Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB
		6 Manajemen Data
		7 Surveilans Kesehatan
59	Fisikawan Medis Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 PP No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif
		2 Peraturan Bapeten No. 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi pada Penggunaan Pesawat Sinar-X dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional
		3 Perka Bapeten No. 17 Tahun 2012 tentang Keselamatan Radiasi dalam Kedokteran Nuklir
		4 Perka Bapeten No. 3 Tahun 2013 tentang Keselamatan Radiasi dalam Radioterapi
		5 Perka Bapeten No. 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif
		6 Perka Bapeten No. 4 Tahun 2013 tentang Proteksi Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga
		7 IAEA Safety Standards Series No. General Safety Requirement Part 3
		8 IAEA International Basic Safety Standart for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Souce No. 115
		9 Pedoman teknis penetapan dan penerapan pembatas dosis pekerja radiasi di fasilitas kesehatan
		10 Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor: 1211/KV/2021 tentang Penetapan Nilai Tingkat Panduan Diagnostik
		11 Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik
		Kemampuan Khusus:
		1 NCRP 147 Structural Shielding Design for Medical X-Ray Facilities
		2 NCRP 145 New Dental X-Ray Guidelines
		3 Perka Bapeten No. 4 Tahun 2013 tentang Proteksi Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga
		4 Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional
		5 International Atomic Energy Agency Technical Report Series No. 457: Dosimetry in Diagnostic Radiology: an International Code of Practice
		6 NCRP 151 Shielding Evaluation for Radiotherapy Bunker
		7 SRS 47 Radiation Protection in the design of Radiotherapy facilities
		8 IAEA Technical Report Series No. 398 Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy
		9 ICRU Report 29 Dose spesification for reporting external beam therapy in photons and electrons Prescribing recording reporting photon beam therapy
		10 AAPM Radiation Therapy Committee TG 40
		11 Acceptance Test Procedures Bracytherapy
		12 TRS 398
		13 IAEA Tecdoc 989 Quality Assurance in Radiotherapy
		14 Protokol QA TG 51
		15 Peraturan Kepala Bapeten No. 17 Tahun 2012 mengenai pelayanan keselamatan radiasi dalam bidang kedokteran nuklir
		16 Peraturan Bapeten No. 3 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan standar produk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor ketenaganukliran
		17 PP No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif
		18 PP No. 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif
		19 ICRP Publications 53, 80, 106: Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals
		20 IAEA: Nuclear Medicine Physics: A Handbook for Teachers and Students
		21 Stabin M. The Importance of Patient Specific Dose Calculation in Nuclear Medicine Nucl. Eng and Tech. Vol. 40, No. 7 2008
		22 International Commission on Radiation Units and Measurements Absorbed-dose specification in Nuclear Medicine ICRU Rep. 67
		23 Peraturan Kepala Bapeten No. 16 Tahun 2012 tentang Tingkat Klierens
		24 Perka Bapeten No. 7 Tahun 2017 tentang Nilai Batas Radioaktif Lingkungan
		25 AAPM Task Group 177: Acceptance Testing and Annual Physics Survey Recommendations for Gamma Camera, SPECT, and SPECT/CT Systems
		26 IAEA, Quality Assurance for Radioactivity Measurement in Nuclear Medicine, Technical Reports Series No. 454
60	Fisioterapis Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Kepmenaker No. 49 Tahun 2018 tentang SKKNI Fisioterapi
		2 Permenkes 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi
		3 Permenkes 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis
		4 Kode Etik Fisioterapi Indonesia
		Kemampuan Khusus:

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		Kepmenaker No. 49 Tahun 2018 tentang SKKNI Fisioterapi
61	Fisioterapis Terampil	Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2 Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2014 tentang ASN 3 Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapis Indonesia Nomor : 0314/KEP/PP-IFI/2023 4 PMK No NOMOR 80 TAHUN 2013 Tentag Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis 5 PMK NOMOR 65 TAHUN 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi Kemampuan Khusus: 1 Standar kompetensi Fisioterapi Indonesia Identifikasi problematika Fisioterapi Tindakan Fisioterapi Menyusun laporan hasil pemeriksaan Menyusun laporan kemajuan intervensi Menyusun laporan penghentian/kelanjutan terapi Membuat laporan dan dokumentasi diagnosis Fisioterapi berdasarkan ICF
62	Guru Ahli Pertama	1 Konsep suatu disiplin ilmu yang relevan 2 Materi suatu disiplin ilmu yang relevan 3 Hirarki konsep dan materi suatu disiplin ilmu 4 Prasyarat dari suatu disiplin ilmu yang relevan 5 Keterkaitan suatu konsep dengan konsep yang lain 6 Konsep-konsep yang berkaitan dengan suatu disiplin 7 Teori belajar Ausubel 8 Teori belajar Gagne 9 Teori belajar Piaget 10 Karakteristik murid berkebutuhan khusus 11 Tahapan perkembangan berdasarkan usia dan karakteristik khas masing-masing tahap 12 Teori belajar Gagne: Taksonomi Bloom dan perkembangannya 13 Profil Pelajar Indonesia 14 Teori Belajar Gagne 15 Learning Objective 16 Individualized Education Program (IEP) dan Prinsip-prinsip differentiated learning 17 Teori dasar komunikasi 18 Active listening 19 Kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar 20 Konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan 21 Mengembangkan motivasi siswa 22 Behavior modification & habit formation 23 Prinsip-prinsip reward, punishment, dan reinforcement dalam pembentukan tingkah laku 24 Desain pembelajaran 25 Facilitating learning 26 Berfikir kritis 27 Berbagai teknik asesmen di tingkat kelas (classroom-based assessment) sesuai dengan tujuan pembelajaran 28 Konsep dan prinsip assessment as learning dan assessment for learning 29 Pemanfaatan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran (feedback) 30 Program remedial dan program pengayaan berdasarkan hasil asesmen 31 Refleksi 32 Procedural & declarative knowledge 33 Working memory & long-term memory 34 Kode etik guru 35 Interaksi guru-murid 36 School safety 37 Diversity 38 Pengertian dan pengembangan potensi 39 Perencanaan karir dan pengembangan potensi diri
63	Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Regulasi Nasional dan Internasional tentang Penerbangan Sipil 2 Tugas, tanggung jawab dan kompetensi Inspektur Kelaikudaraan 3 Dasar Teknik 4 Dasar Audit Kemampuan Khusus: 1 Proses Sertifikasi Pesawat dan Persyaratan Kelaikudaraan 2 Proses Penerbitan Sertifikat Operator Penerbangan 3 Proses Penerbitan Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat 4 Proses Penerbitan Sertifikat Kecakapan Personal 5 Proses Penerbitan Sertifikat Organisasi Pelatihan 6 Proses Penerbitan Sertifikat Komponen 7 Prosedur Audit dan Surveillance AOC

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		8 Prosedur Audit dan Surveillance AMO
64	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan 7 SNI CXC 1- 1969 Rev 5 tentang Prinsip Umum Hygiene Pangan Kemampuan Khusus: 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan 6 Peraturan Kepala Badan KIPM Nomor 95 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 7 Peraturan Kepala Badan KIPM Nomor 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan dalam rangka Penyediaan Pangan 8 Peraturan Kepala Badan KIPM Nomor 02 Tahun 2017 tentang tata cara penerbitan, pembekuan, dan pencabutan nomor registrasi UPI ke negara mitra 9 Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement 10 Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi 11 Sistem Manajemen Mutu Lembaga Penguji 12 Peraturan Menteri KP Nomor 21 Tahun 2019 tentang pelayanan publik lingkup KKP 13 SNI CXC 1- 1969 Rev 5 tentang Prinsip Umum Hygiene Pangan
65	Instruktur Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Identifikasi Pengetahuan K3 Umum 2 Identifikasi Kebutuhan Pelatihan atau Pengukuran Produktivitas 3 E-learning 4 Pendampingan Pelatihan Kerja Kemampuan Khusus: 1 Identifikasi Kebutuhan Pelatihan atau Pengukuran Produktivitas 2 Rencana Pelaksanaan Pelatihan 3 Media Pembelajaran 4 Perangkat Penilaian 5 Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan 6 Pelatihan Tatap Muka 7 Pemeliharaan Peralatan Pelatihan 8 Bimbingan Konsultansi 9 Perangkat Evaluasi Hasil Pembelajaran 10 Evaluasi Hasil Pembelajaran
66	Konselor Adiksi Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Regulasi nasional dan internasional tentang rehabilitasi GPN 2 Pengetahuan tentang komunikasi efektif di bidang P4GN 3 Pengetahuan adiksi narkoba Kompetensi Khusus: 1 Skrining 2 Penerimaan Awal 3 Asesmen 4 Rencana Rawatan 5 Rancangan Edukasi 6 Edukasi 7 Konseling Individu 8 Konseling Kelompok 9 Intervensi Keluarga 10 Penanganan Krisis 11 Konferensi Kasus 12 Konsultasi dan Koordinasi 13 Supervisi Layanan 14 Pencatatan dan Pelaporan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
67	Kurator Koleksi Hayati Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Pengenalan Kurator Koleksi Hayati
		2 Manajemen Koleksi
		Kompetensi Khusus:
		1 Eksplorasi Koleksi Keanekaragaman Hayati
		2 Teknik Handling Spesimen dan/atau Kultur Koleksi
68	Manggala Agni Pemula	3 Dasar-Dasar Analisis Koleksi
		4 Perawatan Spesimen dan/atau Kultur Koleksi dan Fasilitas Pendukung Koleksi
		5 Pelaporan Koleksi Hayati
		Kemampuan Umum:
		1 Wawasan regulasi terkait peraturan perundangan lingkungan hidup dan kehutanan
		2 Wawasan regulasi terkait peraturan perundangan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
		3 Wawasan regulasi terkait peraturan perundangan jabatan fungsional Manggala Agni
		4 Wawasan umum terkait lingkungan hidup dan kehutanan
		5 Wawasan umum terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan
		Kemampuan Khusus:
		1 Identifikasi data dan informasi untuk kebutuhan pemberdayaan masyarakat
69	Manggala Agni Terampil	2 Pendampingan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
		3 Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
		4 Pemeliharaan sekat bakar, sekat kanal, embung, kantong air, atau bangunan air lainnya
		5 Penatalaksanaan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan
		6 Identifikasi data dan informasi kebakaran hutan dan lahan serta pemantauan titik panas (hotspot)
		7 Penatalaksanaan pemadaman darat
		8 Evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran hutan dan lahan
		9 Detasering/penjagaan terhadap areal pascakebakaran hutan dan lahan
		10 Inovasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan
		Kemampuan Umum
		1 Wawasan regulasi terkait lingkungan hidup dan kehutanan
2 Wawasan regulasi terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan		
3 Wawasan umum terkait lingkungan hidup dan kehutanan		
4 Wawasan umum terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan		
Kemampuan Khusus		
1 Pendampingan pencegahan kebakaran hutan dan lahan		
2 Pemeliharaan sekat bakar, sekat kanal, embung, kantong air, atau bangunan air lainnya		
3 Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan		
4 Pengelolaan sistem peringatan dini		
5 Penatalaksanaan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan		
6 Pengecekan lapangan informasi kebakaran hutan dan lahan (groundcheck hotspot)		
7 Penatalaksanaan pemadaman darat		
8 Dukungan pemadaman udara		
9 Evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran hutan dan lahan		
10 Inventarisasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan		
11 Inovasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan		
70	Medik Veteriner Ahli Pertama	1 Peraturan,Perundang -Undangan bidang Peternakan dan Pengertian umum di bidang Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan
		2 Prosedur Tatacara Penanganan, Pemeliharaan dan Pemeriksaan bidang Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan
		3 Tatacara Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
		4 Identifikasi Status Reproduksi dan Penanganan Reproduksi dan Kebidanan pada Hewan
71	Metrolog Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 UU No. 20 Tahun 2014
		2 UU No. 2 Tahun 1981
		3 UU No. 33 Tahun 2014
		4 PP No. 34 Tahun 2018
		5 Permenpan RB No. 43 Tahun 2020
		6 Pedoman KAN terkait kalibrasi peralatan (kan.or.id)
		7 Pedoman SNSU terkait kalibrasi peralatan (kan.or.id)
		8 Kursus pengantar metrologi (elearning.bsn.go.id)
		9 Website BSN (bsn.go.id)
		10 Website Layanan Kalibrasi dan Penyelenggara Uji Profisiensi BSN (www.sparta.bsn.go.id)
		11 OIML R 111 (www.oiml.org)
		12 www.bipm.org/kcdb/
		13 www.apmpweb.org
		14 http://www.apmpweb.org/documents/file/mou.pdf
Kemampuan Khusus:		
1 SNI ISO/IEC 17025:2017		
2 SNI ISO 17043:2010		
3 SNI ISO 17034:2016		

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSR**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		4 SNI ISO 35001:2019
		5 SNI ISO 20224-3:2020
		6 ISO 1
		7 SNI ISO 9001
		8 ISO Guide 35:2017
		9 ISO GUM
		10 Dasar-dasar Statistika
		11 Dasar-dasar Mikrobiologi
		12 Dasar-dasar Manajemen Biorisiko
		13 Buku Spesifikasi, Metrologi, dan Kontrol Kualitas Geometrik Jilid 1
		14 Buku Konsep Dasar Akustik untuk Pengendalian Kebisingan
		15 Buku Metrology In Short
		16 Ketidakpastian Pengukuran
		17 Buku Fisika Dasar
		18 Buku Kimia Dasar
		19 Buku Kimia Organik
		20 Dasar-dasar Pengukuran Besaran Listrik
		21 Buku Pengantar Metrologi Kelistrikan
		22 Panduan kalibrasi micrometer
		23 Panduan Alat Pengukur Getaran (Vibration Meter)
		24 Pemahaman analisis Polymerase Chain Reaction (PCR)
		25 Karakterisasi Deoxyribonucleicacid DNA
		26 Pemahaman DNA plasmid
		27 Pemahaman proses kloning
		28 Karakterisasi Mikroba pada Pangan
		29 Calibration and Measurement Capabilities in the context of CIPM MRA
		30 International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) Recommendation 2002
		31 Panduan KAN (Guide on the Evaluation and Expression) - kan.or.id
		32 Panduan KAN (Guide on Measurement Assurance) - kan.or.id
		33 Handbook of Humidity Measurement: Methods, Materials and Technologies
		34 The National Institute of Standards and Technology (NIST) Frequency Measurement and Analysis System (FMAS)
		35 Traceable Temperature Textbook, John Wiley & Son
		36 Diagnostic Methods I: Sensitivity, specificity, and other measures of accuracy (Stralen et al., 2009)
		37 Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM 100:2008)
		38 Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA 4/02:M-2013)
		39 International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms (VIM) 3rd edition
		40 Calibration philosophy in practice 2nd edition
		41 Application Note 6 ERM. Use of ERM certificates and materials
		42 Guidelines for the Selection and Use of Reference Materials ILAC-G9:2005
		43 Eurachem Guide, "Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement", 2012
		44 Eurachem - Selection, Use and Interpretation of Proficiency Testing (PT) Schemes
		45 Guide to Quality in Analytical Chemistry Citac/Eurachem Guide
72	Negotiator Perdagangan Ahli Pertama	Kemampuan Khusus: 1 Penyajian data dan informasi perdagangan serta penjelasan terkait data dan informasi perdagangan yang menjadi kewenangannya 2 Analisis bahan kerjasama perdagangan internasional 3 Advokasi kebijakan, monitoring dan evaluasi hasil advokasi 4 Analisis posisi runding dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait sesuai dengan prosedur kerja yang ada 5 Isu yang relevan terkait perundingan/kerja sama perdagangan internasional di kawasan atau mitra dagang (ekonomi, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan) 6 Analisis bahan untuk aktivasi perjanjian internasional sesuai dengan pedoman yang berlaku
73	Nutrisionis Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Keputusan Menkes RI No. HK.01.07/Menkes/1910/2022 tentang Standar Profesi Dietisien dan Permenkes No. 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi 2 Asuhan gizi klinik (clinical nutrition) 3 Kebijakan kesehatan spesifik yang merupakan prioritas daerah masing-masing di Indonesia Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan masalah gizi 2 Pemantauan/surveilans gizi 3 Pemberdayaan dan kolaborasi dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat gizi dan kesehatan 4 Asuhan gizi individu, kelompok dan masyarakat 5 Pengelolaan sistem penyelenggaraan makanan (food service) 6 Pengelolaan sumber daya lokal, bisnis gizi (nutripreneurship)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
74	Nutrisionis Terampil	Keterampilan Umum:
		1 Pengelolaan asuhan gizi
		2 Pengelolaan Gizi Masyarakat
		3 Penyelenggaraan makanan banyak (Food Service)
		Keterampilan Khusus:
		1 Pengelolaan asuhan gizi
2 Pengelolaan Gizi Masyarakat		
3 Penyelenggaraan makanan banyak (Food Service)		
75	Okupasi Terapis Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
		2 PMK No. 76 tentang Standar Layanan Terapi Okupasi
		3 SK IOTI No. 134/Skep/IOTI.PUSAT//2021 tentang Perubahan Kode Etik Okupasi Terapis
		Kemampuan Khusus:
		1 Screening
		2 Pemeriksaan ADLs
		3 Pemeriksaan kesadaran sensoris
		4 Pemeriksaan taktil
		5 Pemeriksaan proprioseptif
		6 Pemeriksaan Vestibular
		7 Pemeriksaan Visual
		8 Pemeriksaan pendengaran
		9 Pemeriksaan pengecap
		10 Pemeriksaan stereognosis
		11 Pemeriksaan kinesthesia
		12 Pemeriksaan respon nyeri
		13 Pemeriksaan skema tubuh
		14 Pemeriksaan diskriminasi sisi kanan-kiri
		15 Pemeriksaan konstansi bentuk
		16 Pemeriksaan posisi dalam ruang
		17 Pemeriksaan Visual-Closure
		18 Pemeriksaan persepsi latar depan dan belakang
		19 Pemeriksaan persepsi kedalaman/jarak
		20 Pemeriksaan hubungan spasial
		21 Pemeriksaan orientasi topografi
		22 Pemeriksaan biomekanik penunjang okupasional
		23 Pemeriksaan neuromuscular penunjang okupasional
		24 Pemeriksaan koordinasi motorik kasar penunjang okupasional
		25 Pemeriksaan menyilang garis tengah tubuh penunjang okupasional
		26 Pemeriksaan lateralitas penunjang okupasional
		27 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional
		28 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional
		29 Pemeriksaan praksis
		30 Pemeriksaan koordinasi gerak halus/dexteritas
		31 Pemeriksaan integrasi visual motor
		32 Pemeriksaan orientasi
		33 Pemeriksaan recognisi
		34 Pemeriksaan rentang atensi
		35 Pemeriksaan memori
		36 Pemeriksaan sekuentis
		37 Pemeriksaan kategorisasi
		38 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik
		39 Pemeriksaan konsep diri
		40 Pemeriksaan kinerja peran
		41 Pemeriksaan partisipasi sosial
		42 Pemeriksaan keterampilan interpersonal
		43 Identifikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional
		44 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi
		45 Prognosis fungsional
		46 Terapi berbasis komponen kinerja okupasional
		47 Area kinerja okupasional
		48 Penanganan okupasi terapi pada kondisi gangguan sensomotorik penunjang okupasional
		49 Penanganan okupasi terapi pada kondisi gangguan integrasi sensori
		50 Penanganan okupasi terapi pada kondisi pemrosesan persepsi penunjang okupasional
		51 Penanganan okupasi terapi pada kondisi gangguan biomekanik penunjang okupasional
52 Penanganan okupasi terapi pada kondisi gangguan neuromuskular penunjang okupasional		
53 Penanganan okupasi terapi pada kondisi gangguan integrasi kognitif penunjang okupasional		
54 Penanganan okupasi terapi pada kondisi psikososial penunjang okupasional		
55 Penerapan teknologi dan alat bantu fungsional		
56 Dokumentasi proses okupasi terapi		

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
76	Operator Layanan Operasional	1 Menerima dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumennya sesuai dengan prosedur
		2 Mencatat dokumen sarana dan prasarana pada lembar/buku kendali untuk tertib administrasi dan memudahkan pencarian
		3 Mendistribusikan sarana dan prasarana ke unit terkait
		4 Menginventarisasi sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur
		5 Mengatur penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
		6 Mengecek kondisi sarana dan prasarana dan lingkungan kantor
		7 Memelihara sarana dan prasarana
		8 Memberikan layanan permintaan dan peminjaman sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur
77	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil	Pengetahuan Umum:
		1 Materi umum terkait Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat, Dasar Negara, dan Undang-Undang Dasar
		2 Materi tentang Pemerintahan Pusat-Daerah, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat Umum
		3 Materi tentang Pengetahuan Komputer yang bersifat umum
		Pengetahuan Khusus:
		1 Materi khusus terkait Administrasi Kependudukan yang bersifat khusus
		2 Materi tentang Pencatatan Sipil yang bersifat khusus
		3 Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Operator SIAK
78	Pamong Belajar Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Karakteristik, kebutuhan perkembangan peserta didik
		2 Teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran pedagogi dan andragogi
		3 Program kegiatan pembelajaran
		4 Strategi kegiatan pembelajaran
		5 Peningkatan kualitas pembelajaran melalui tindakan reflektif
		Kemampuan Khusus:
		1 Kebutuhan belajar, sumber belajar, potensi, dan permasalahan peserta didik
		2 Konsep keilmuan yang relevan untuk kegiatan pembelajaran, pengkajian dan pengembangan model
		3 Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
		4 Kegiatan pembelajaran, pengkajian program dan pengembangan model
		5 Konsep prinsip-prinsip, metode dan teknik penelitian
6 Pengetahuan dan keterampilan fungsional		
79	Pamong Budaya Ahli Pertama	1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
		2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
		3 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film
		5 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum
		6 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2027 tentang Pemajuan
		7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
		8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 th 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda
		9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan
		10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran
		11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri
		12 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya
		13 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum
		14 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasinal Cagar Budaya
80	Pamong Budaya Terampil	1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
		2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
		3 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film
		5 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum
		6 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2027 tentang Pemajuan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
		8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 th 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda
		9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan
		10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran
		11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri
		12 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya
		13 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum
		14 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya
81	Paramedik Karantina Hewan Pemula	Kemampuan Umum: 1 UU No 21 Tahun 2019 2 PP No 82 Tahun 2000 Kemampuan Khusus: 1 Prosedur, tata cara dan elemen tindakan karantina hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan 2 Prosedur dan tata cara pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani 3 Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur mitigasi risiko bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani 4 Identifikasi dan pemantauan daerah sebar HPHK melalui pengamatan, pengawasan, monitoring dan pemetaan HPHK
82	Paramedik Veteriner Pemula	Kompetensi Khusus: 1 Peraturan Perundang-Undangan bidang Peternakan dan Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan 2 Prosedur Tatacara Penanganan, Pemeliharaan dan Pemeriksaan bidang Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan 3 Tatacara Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 4 Identifikasi Status Reproduksi dan Penanganan Reproduksi dan Kebidanan pada Hewan
83	Paramedik Veteriner Terampil	Kompetensi Khusus: 1 Peraturan Perundang-Undangan bidang Peternakan dan Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan 2 Prosedur Tatacara Penanganan, Pemeliharaan dan Pemeriksaan bidang Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan 3 Tatacara Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 4 Identifikasi Status Reproduksi dan Penanganan Reproduksi dan Kebidanan pada Hewan
84	Pekerja Sosial Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Perumusan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial 2 Advokasi kebijakan oelayanan kesejahteraan sosial serta monitoring dan evaluasi hasil Kompetensi Khusus: 1 Analisis kelayakan perencanaan pekerjaan sosial sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis 2 Penyiapan bahan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis terkait manajemen pekerjaan sosial 3 Penyusunan rancangan sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial 4 Penerapan layanan pekerjaan sosial sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis 5 Penyajian bahan terkait dengan pembinaan dan pengawasan pekerja sosial
85	Pemadam Kebakaran Pemula	Kompetensi Umum: 1 Teori Segitiga Api 2 Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3 Kesiapsiagaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 4 Keselamatan Petugas dan Penggunaan Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) Kompetensi Khusus: 1 Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2 Tali Temali dan Penyelamatan 3 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (PPPK)
86	Pemadam Kebakaran Terampil	Kompetensi Umum: 1 Teori Segitiga Api 2 Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta alat komunikasi 3 Kesiapsiagaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 4 Keselamatan Petugas dan Penggunaan Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) Kompetensi Khusus: 1 Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2 Tali Temali dan Penyelamatan 3 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (PPPK)
87	Pembimbing Kesehatan Kerja	Kemampuan Umum:

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK		
	Ahli Pertama	1 Konsep dasar, teknis, metode pemberdayaan dan pengembangan kemitraan kesehatan masyarakat pekerja		
		2 Langkah pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kemitraan kesehatan masyarakat pekerja		
		3 Manajemen pelaksanaan pembimbingan dalam pemberdayaan dan pengembangan kemitraan kesehatan masyarakat pekerja		
		4 Kemampuan Khusus:		
		5 Prinsip dan metode		
		6 Tahap pelaksanaan		
		7 Pengumpulan data		
		8 Pengolahan, penyajian dan interpretasi data		
		9 Analisis Data		
		10 Perencanaan sampai dengan monitoring evaluasi		
		Kemampuan Khusus:		
		1 Konsep dasar SMK3		
		2 Perencanaan penerapan SMK3		
		3 Tahapan SMK3		
		4 Penyusunan dan penyampaian informasi SMK3		
		5 Penguraian informasi SMK3		
		6 Manajemen risiko di tempat kerja		
		7 Pembimbingan dan pendampingan pelaksanaan program Kesehatan Kerja		
		88	Pembina Industri Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
				1 Wawasan tentang industri dan peranannya
				2 Undang-Undang Perindustrian, RIPIN, KIN
		Kemampuan Khusus:		
		Perencanaan pembangunan nasional, pembangunan sumber daya industri, dan Bangun Industri Nasional		
		Standar Produk dan Standar Kompetensi (SNI dan SKKNI)		
		Konsepsi, Sejarah, dan Penerapan Industri 4.0, Making Indonesia 4.0, dan INDI 4.0		
		Konsepsi Teknologi Industri, Manfaat Penggunaan, Technology Readiness Level		
		Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri		
		Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Tertentu, serta Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)		
89	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	Kompetensi Umum:		
		1 Manajemen Kontrak Konstruksi		
		2 Manajemen Risiko Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		
		3 Kebijakan Publik		
		4 Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah		
		5 Statistik Monev dan Pelaporan		
		6 Manajemen Lingkungan Pekerjaan Konstruksi		
		Kompetensi Khusus:		
		1 Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi		
		2 Pengembangan Kerjasama Jasa Konstruksi Strategis Di Dalam Dan Luar Negeri		
		3 Manajemen Pemberdayaan Usaha Jasa Konstruksi		
		4 Manajemen Pengembangan Pasar Jasa Konstruksi		
		5 Pembinaan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi		
		6 Manajemen Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi		
		7 Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) Bidang Jasa Konstruksi		
		8 Pembinaan Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi		
		9 Manajemen Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi		
		10 Manajemen Rantai Pasok Material Dan Peralatan Konstruksi		
		11 Manajemen Pengembangan Teknologi Konstruksi		
		12 Manajemen Peningkatan Penggunaan Komponen Dalam Negeri		
		13 Manajemen Pengembangan Kelembagaan Jasa Konstruksi		
		14 Manajemen K3 Konstruksi		
		15 Manajemen Penjaminan Dan Pengendalian Mutu Konstruksi		
		16 Manajemen Konstruksi Hijau		
90	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:		
		Peraturan terkait pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan		
		Kemampuan Khusus:		
		1 Pengembangan usaha dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan		
		2 Perumusan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan		
		3 Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan		
		4 Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan		
		5 Uji terap teknik produk kelautan dan perikanan		
		6 Pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan		
91	Pemeriksa Karantina	Kemampuan Umum:		

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
	Tumbuhan Pemula	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sistem budidaya tanaman 2 Terminologi pertanian 3 Regulasi pertanian <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Wawasan tentang Badan Karantina Pertanian, perkarantinaaan tumbuhan, ilmu pertanian 2 Regulasi karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati 3 Ilmu hama dan penyakit tumbuhan 4 Serangga, tungau, dan mikroba (virus, protista, bakteri, dan jamur) 5 Pemantauan daerah sebar OPT/OPTK
92	Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi Ahli Pertama	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penanganan laporan dan penyusunan kertas kerja serta konsultasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan/pengawasan/audit di bidang perdagangan berjangka komoditi/sistem resi gudang/pasar lelang komoditas 2 Analisis data dan dokumen serta pemberian layanan informasi terkait pengaturan perdagangan berjangka komoditi/sistem resi gudang/pasar lelang komoditas 3 Penyajian data dan informasi serta identifikasi terkait pembinaan dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas 4 Analisis pelaksanaan fasilitasi substansi perdagangan berjangka komoditi/sistem resi gudang/pasar lelang komoditas
93	Penata Anestesi Ahli Pertama	<p>Kemampuan Umum:</p> <p>Kepmenkes HK-01.07/MENKES/722/2020 tentang Standar Kompetensi Penata Anestesi</p> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kepmenkes HK-01.07/MENKES/722/2020 tentang Standar Kompetensi Penata Anestesi 2 Permenpan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Penata Anestesi 3 Permenkes Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pekerjaan Penata Anestesi
94	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	<p>Kompetensi Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 2 Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman <p>Kompetensi Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 2 Penyelenggaraan Bangunan Gedung 3 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau 4 Penataan Bangunan dan Lingkungan 5 Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
95	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	<p>Kompetensi Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Jalan dan Jembatan 2 Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan <p>Kompetensi Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Perencanaan Teknis Jalan, Jembatan dan Terowongan 2 Pelaksanaan Konstruksi Jalan 3 Pelaksanaan Konstruksi Jembatan dan Terowongan 4 Preservasi Jalan, Jembatan dan Terowongan 5 Lingkungan dan Keselamatan Jalan 6 Pengadaan Lahan dan Dampak Sosial 7 Pendanaan Jalan, Jembatan dan Terowongan 8 Pengoperasian Lalu Lintas 9 Bahan Uji Mutu
96	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sejarah Pemilu di Indonesia 2 Sistem Pemilu dan Pilkada 3 Praktik Pemilu di Indonesia 4 Struktur Organisasi 5 Kewenangan 6 Etik 7 Policy maker dan implementator 8 Kewajiban KPU (komisioner) 9 Tugas dan Fungsi Kesekretariatan 10 Perencanaan keuangan dan anggaran 11 Tahapan pelaksanaan anggaran 12 Pecalonan 13 Data pemilih 14 Pemungutan dan penghitungan suara 15 Dasar hukum pemilu 16 Undang-Undang Pemilu 17 Peraturan KPU 18 Azas-azas Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 20 Kode Etik

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
97	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
		2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
		3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
		4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
		5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
		6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
		8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS
		9 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK
		10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
		11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
		12 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
		13 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		14 Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2021 dan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
		15 Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
		16 Peraturan Menteri PANRB Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
		17 Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal
		18 Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
		19 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
98	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Teori Pemilihan Umum
		2 Sistem-sistem Pemilihan Umum
		3 Peran dan Fungsi Bawaslu, KPU, dan DKPP
		4 Perkembangan Kelembagaan Pengawasan Pemilihan Umum
		Kemampuan Khusus:
		1 Pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu
		2 Penyusunan pedoman penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu
		3 Pengawasan Pemilu
		4 Pengawasan partisipatif
		5 Pelaporan dan registrasi dugaan pelanggaran Pemilu
6 Persidangan pelanggaran Pemilu		
7 Pemantauan putusan penanganan pelanggaran Pemilu		
8 Permohonan sengketa proses Pemilu		
9 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu		
10 Tindak lanjut dan pemantauan putusan		
99	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Penyehatan Lingkungan
		2 Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur penyehatan lingkungan
		Kompetensi Khusus:
		1 Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
		2 Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan
		3 Pengelolaan Air Limbah Domestik
4 Pengelolaan Drainase Lingkungan		
100	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Penyusunan Kebijakan, Strategi, dan Program
		2 Pemantauan Evaluasi
		3 Pengelolaan Data dan Informasi
		4 Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
		5 Penyelenggaraan Pembinaan Teknis
		6 Manajemen Risiko
		7 Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
		Kompetensi Khusus:
		1 Perencanaan Teknis
		2 Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
3 Penyelenggaraan dan Stimulan Rumah Umum dan Komersial		
4 Penyelenggaraan Rumah Susun		
5 Stimulan Perumahan Swadaya		

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		6 Pengawasan Konstruksi
		7 Pemanfaatan Rumah Susun/Rumah Khusus
101	Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Pemula	Kompetensi Umum:
		1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
		2 Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
		Kompetensi Khusus:
		1 Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
		2 Penyelenggaraan Bangunan Gedung
		3 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau
		4 Penataan Bangunan dan Lingkungan
		5 Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
102	Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Terampil	Kompetensi Umum:
		1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
		2 Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
		Kompetensi Khusus:
		1 Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
		2 Penyelenggaraan Bangunan Gedung
		3 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau
		4 Penataan Bangunan dan Lingkungan
		5 Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
103	Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula	Kompetensi Umum:
		1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Jalan dan Jembatan
		2 Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
		Kompetensi Khusus:
		1 Perencanaan Teknis Jalan, Jembatan dan Terowongan
		2 Pelaksanaan Konstruksi Jalan
		3 Pelaksanaan Konstruksi Jembatan dan Terowongan
		4 Preservasi Jalan, Jembatan dan Terowongan
		5 Lingkungan dan Keselamatan Jalan
		6 Pengadaan Lahan dan Dampak Sosial
		7 Pendanaan Jalan, Jembatan dan Terowongan
		8 Pengoperasian Lalu Lintas
		9 Bahan Uji Mutu
104	Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil	Kompetensi Umum:
		1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Jalan dan Jembatan
		2 Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
		Kompetensi Khusus:
		1 Perencanaan Teknis Jalan, Jembatan dan Terowongan
		2 Pelaksanaan Konstruksi Jalan
		3 Pelaksanaan Konstruksi Jembatan dan Terowongan
		4 Preservasi Jalan, Jembatan dan Terowongan
		5 Lingkungan dan Keselamatan Jalan
		6 Pengadaan Lahan dan Dampak Sosial
		7 Pendanaan Jalan, Jembatan dan Terowongan
		8 Pengoperasian Lalu Lintas
		9 Bahan Uji Mutu
105	Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Pemula	Kompetensi Umum:
		1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Penyehatan Lingkungan
		2 Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur penyehatan lingkungan
		Kompetensi Khusus:
		1 Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
		2 Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan
		3 Pengelolaan Air Limbah Domestik
		4 Pengelolaan Drainase Lingkungan
106	Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Terampil	Kompetensi Umum:
		1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Penyehatan Lingkungan
		2 Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur penyehatan lingkungan
		Kompetensi Khusus:
		1 Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
		2 Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan
		3 Pengelolaan Air Limbah Domestik

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		4 Pengelolaan Drainase Lingkungan
107	Penata Laksana Sumber Daya Air Pemula	Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Sungai 3 Pengelolaan Daerah Pantai 4 Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan 5 Pengelolaan Daerah Irigasi 6 Pengelolaan Daerah Rawa 7 Pengelolaan Daerah Air Tanah & Air Baku 8 Pengelolaan Bendungan 9 Pengelolaan Tampungan Air Lainnya (Danau, Situ, Embung)
108	Penata Laksana Sumber Daya Air Terampil	Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Sungai 3 Pengelolaan Daerah Pantai 4 Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan 5 Pengelolaan Daerah Irigasi 6 Pengelolaan Daerah Rawa 7 Pengelolaan Daerah Air Tanah & Air Baku 8 Pengelolaan Bendungan 9 Pengelolaan Tampungan Air Lainnya (Danau, Situ, Embung)
109	Penata Layanan Operasional	1 Melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional 2 Menyusun rencana layanan operasional 3 Menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional 4 Melaksanakan layanan operasional sesuai hasil kajian 5 Mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional
110	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Konsep Dasar Penanggulangan Bencana 2 Perencanaan Penanggulangan Bencana Kompetensi Khusus: 1 Pengkajian Risiko Bencana 2 Kesiapsiagaan logistik dan peralatan bencana 3 Pelaksanaan kesiapsiagaan masyarakat 4 Fasilitasi kebutuhan korban dan pengungsi 5 Mitigasi bencana 6 Pusedalops 7 Peringatan dini bencana 8 Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya 9 Rencana operasi penanganan darurat 10 Pengendalian operasi/komando penanganan 11 Pemenuhan kebutuhan dasar 12 Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital 13 Konsep dasar distribusi logistik dan peralatan 14 Tahapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka kegiatan logistik dan 15 Pemulihan dan peningkatan fisik pasca bencana 16 Tahapan penyusunan rencana pemulihan fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan publik, keamanan dan ketertiban 17 Asistensi perencanaan pelaksanaan pemulihan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam
111	Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Konsep dan strategi pemerolehan naskah atau materi audiovisual 2 Rencana kerja dan kegiatan promosi dan desiminasi terbitan ilmiah 3 Etika publikasi dalam proses verifikasi pemerolehan naskah atau materi audiovisual Kompetensi Khusus: 1 Penerimaan naskah atau materi audiovisual 2 Penelaahan dan penilaian naskah atau materi audiovisual 3 Penyuntingan 4 Desain 5 Produksi
112	Penata Perlindungan Saksi dan Korban Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Tugas dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2 Definisi Perlindungan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		3 Definisi Subyek Perlindungan
		4 Syarat Permohonan Perlindungan
		5 Tata Cara Pengajuan Permohonan
		6 Jangka Waktu Permohonan Perlindungan
		7 Persiapan Layanan Permohonan Perlindungan
		8 Jenis Tindak Pidana Dalam Pemberian Perlindungan
		9 Hak Saksi dan Korban
		10 Jenis Layanan Perlindungan
		11 Jangka Waktu Pemberian Perlindungan
		Kemampuan Khusus:
		1 Investigasi
		2 Asesmen
		3 Penelaahan Dokumen Permohonan Perlindungan
		4 Telaah Materiil Permohonan
		5 Risalah Permohonan
		6 Keputusan Pemberian Perlindungan
		7 Teknis Perlindungan Fisik
		8 Teknis Pemberian Bantuan Medis dan Rehabilitasi Psikologis
		9 Teknis Pemenuhan Hak Prosedural
		10 Teknis Pemberian Rehabilitasi Psikososial
		11 Teknis Pemenuhan Hak Saksi Pelaku
		12 Teknis Pemenuhan Hak atas Pembiayaan
		13 Teknis Perpanjangan atau Pemberhentian Perlindungan
		14 Teknis Pemberian Perlindungan Hukum
		15 Teknis Pemberian Hak atas Informasi
113	Penata Ruang Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Kemampuan Khusus:
		1 Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
		2 Penertiban pemanfaatan ruang
		3 Pengawasan penataan ruang
		4 Pengendalian pemanfaatan ruang
		5 Peninjauan kembali rencana tata ruang
		6 Penyusunan rencana tata ruang
		7 Sinkronisasi program pemanfaatan ruang
114	Peneliti Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Butir-butir Kode Etik Peneliti; Tiga Pilar Etika.
		2 Pengenalan Jurnal Ilmiah dan e-journal; Prosedur dan praktek submit naskah; Praktek penggunaan aplikasi manajemen referensi
		3 Konsep Dasar Kekayaan Intelektual (KI) dan Sistem Perlindungan KI; Kekayaan Intelektual, Inovasi, dan Kegiatan Litbang; Aspek-aspek terkait KI.
		4 Manajemen Penelitian; Implementasi Manajemen Penelitian
		Kompetensi Khusus:
		1 Filosofi dan paradigma kegiatan penelitian; Pendekatan dan metode penelitian (penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed method); Invention, Inovation, Discovery (menuju ke Novelty); Implementasi pendekatan dan metode penelitian.
		2 Konsep proposal penelitian; Kriteria dan formulasi proposal penelitian; Strategi dan teknik penulisan proposal penelitian; Berpikir kritis; Teknik perumusan masalah/pertanyaan penelitian; Metodologi penelitian; Pengelolaan penelitian
		3 Data dan sumber data; Penelusuran informasi ilmiah; Metode pengumpulan data; Instrumen penelitian
		4 Konsep dasar pengolahan data; Metode pengolahan dan analisis data; Penyajian dan interpretasi hasil penelitian; Penarikan kesimpulan.
		5 Konsep penulisan ilmiah; Substansi, jenis, dan bentuk penerbitan untuk tulisan ilmiah; Etika publikasi ilmiah; Strategi publikasi di jurnal ilmiah.
115	Penera Terampil	1 Aturan dan prosedur pelaksanaan Tera Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Tingkat Kesulitan I dan II
		2 Aturan dan prosedur pelaksanaan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Tingkat Kesulitan I dan II
		3 Pengetahuan dasar terkait pengelolaan instalasi uji
116	Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Arab	Kompetensi Umum:
		Teori Penerjemahan
		Kompetensi Khusus:
		1 Merespons kaidah Bahasa Indonesia
		2 Membaca teks Bahasa Indonesia
		3 Struktur Bahasa Arab dan ungkapan tulis Bahasa Arab
		4 Pemahaman membaca teks Bahasa Arab
117	Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Inggris	Kompetensi Umum:
		Teori Penerjemahan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		Kompetensi Khusus:
		1 Merespons kaidah Bahasa Indonesia
		2 Membaca teks Bahasa Indonesia
		3 Struktur Bahasa Inggris dan ungkapan tulis Bahasa Inggris
		4 Pemahaman membaca teks Bahasa Inggris
118	Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Jepang	Kompetensi Umum:
		Teori Penerjemahan
		Kompetensi Khusus:
		1 Merespons kaidah Bahasa Indonesia
		2 Membaca teks Bahasa Indonesia
		3 Struktur Bahasa Jepang dan ungkapan tulis Bahasa Jepang
		4 Pemahaman membaca teks Bahasa Jepang
119	Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Mandarin	Kompetensi Umum:
		Teori Penerjemahan
		Kompetensi Khusus:
		1 Merespons kaidah Bahasa Indonesia
		2 Membaca teks Bahasa Indonesia
		3 Struktur Bahasa Mandarin dan ungkapan tulis Bahasa Mandarin
		4 Pemahaman membaca teks Bahasa Mandarin
120	Pengadministrasi Perkantoran	1 Memproses dokumen sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi
		2 Memilah dokumen sesuai dengan jenisnya
		3 Mengelompokkan dokumen sesuai dengan jenisnya
		4 Mendistribusikan dokumen sesuai dengan jenisnya
		5 Menyimpan dan memelihara dokumen sesuai dengan prosedur
		6 Melayani peminjaman dokumen sesuai dengan ketentuan
121	Pengamat Tera Pemula	1 Ketentuan dan metode pengambilan data alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan, barang dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran
		2 Penyiapan bahan pemeriksaan alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan, barang dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran, perlabelan barang dalam keadaan terbungkus dan pemeriksaan tanda tera serta satuan ukuran pada pengumuman atau pemberitahuan yang menyatakan ukuran, takaran, berat pada tempat penjualan barang
		3 Penyiapan bahan penyuluhan bidang metrologi legal
122	Pengamat Tera Terampil	1 Pengumpulan dan penyajian data terkait alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan, barang dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran
		2 Pemeriksaan dan pengecekan unjuk kerja alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan tingkat kesulitan I, pemeriksaan pelabelan dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang dinyatakan dalam berat secara umum, dan jumlah hitungan, serta pemeriksaan satuan ukuran pada pengumuman
		3 Penyuluhan bidang metrologi legal
123	Pengantar Kerja Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Undang - Undang dan Peraturan - peraturan terkait Jabatan Pengantar Kerja
		2 Asas, metode, dan teknik pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
		3 Data kebutuhan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
		4 Layanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
		5 Asas, metode, dan teknik pelayanan pembinaan kelembagaan dan sumber daya
		6 Layanan kebutuhan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan
		Kemampuan Khusus:
		1 Data pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
		2 Asas, metode, dan teknik pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing
		3 Prosedur penggunaan tenaga kerja asing
		4 Klasifikasi data pelayanan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan
124	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Regulasi terkait Kelembagaan petani pemakai air
		2 Regulasi yang mengatur pengawasan, pengujian serta sertifikasi alat dan mesin komoditas pertanian
		3 Pengetahuan tentang aspek pengawasan, pengujian serta sertifikasi alat dan mesin komoditas pertanian
		Kompetensi Khusus:
		Pengetahuan tentang tata cara pengawasan, pengujian serta sertifikasi alat dan mesin komoditas pertanian
125	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Regulasi nasional dan internasional
		2 Pengetahuan Budidaya Tanaman
		Kompetensi Khusus:
		1 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih
		2 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman
		3 Teknis penilaian dan pelepasan varietas
126	Pengawas Benih Tanaman	Kompetensi Umum:

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
	Pemula	1 Regulasi nasional dan internasional
		2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih
		3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman
		4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas
		5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium
		Kompetensi Khusus
		1 Pengetahuan Budidaya Tanaman
		2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih
		3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman
		4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas
127	Pengawas Benih Tanaman Terampil	5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium
		Kompetensi Umum:
		1 Regulasi nasional dan internasional
		2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih
		3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman
		4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas
		5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium
		Kompetensi Khusus
		1 Pengetahuan Budidaya Tanaman
		2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih
128	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman
		4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas
		5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium
		Kompetensi Umum:
		1 Peraturan perundangan
		2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak
		Kompetensi Khusus:
		1 Sistem perbibitan nasional
		2 Taksonomi pada ternak
		3 Sistem reproduksi ternak
		4 Sistem pencernaan ternak
		5 Sistem hormonal ternak
		6 Genetika pada ternak
		7 Sistem pembelahan sel
		8 Penilaian kualitatif dan kuantitatif pada ternak
		9 Penerapan teknologi bidang peternakan
10 Sistem uji performa dan uji zuriat		
11 Sistem pengujian pada ternak		
12 Istilah bidang peternakan		
13 Sistem produksi semen beku dan embrio		
14 Sistem bidang peternakan		
15 Proses Inseminasi Buatan dan Transfer Embrio		
16 Diagnosa gejala penyakit secara sederhana		
129	Pengawas Bibit Ternak Terampil	Kompetensi Umum:
		1 Peraturan perundangan
		2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak
		Kompetensi Khusus:
		1 Sistem pembibitan ternak
		2 Taksonomi pada ternak
		3 Sistem reproduksi ternak
		4 Sistem pencernaan ternak
		5 Sistem hormonal pada ternak
		6 Genetika pada ternak
		7 Sifat kualitatif dan kuantitatif ternak
		8 Metode pengujian ternak/Uji Performa dan Uji Zuriat
		9 Istilah peternakan
10 Sistem produksi semen beku dan embrio		
11 Sistem manajemen bidang peternakan		
12 Inseminasi buatan dan transfer embrio		
13 Kesehatan hewan sederhana		
130	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Aplikasi-aplikasi dan layanan call center yang ada di BPOM
		2 Sistem kerja dan proses bisnis di BPOM
		3 Tata kerja dan organisasi BPOM
		4 Kejadian terkait bahaya dan/atau risiko di bidang obat dan makanan
		5 Gambaran visi, misi dan budaya kerja POM
		Komptensi Khusus:
1 Kasus/kejadian kejahatan obta dan makanan		
2 Regulasi yang berhubungan dengan bidang penindakan obat dan makanan		

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSR**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		3 Regulasi dalam pengawasan fasilitas produksi obat, produk biologi, narkotika, psikotropika, dan prekursor
		4 Prinsip-prinsip cara pembuatan obat yang baik (CPOB)
		5 Regulasi dalam pengawasan fasilitas distribusi dan pelayanan kefarmasian (obat, produk biologi, narkotika, psikotropika, dan prekursor)
		6 Prinsip-prinsip cara distribusi obat yang baik (CDOB)
		7 Pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian (obat, produk biologi, narkotika, psikotropika, dan prekursor)
		8 Regulasi pengawasan mutu obat
		9 Regulasi pengawasan penandaan/label dan/atau iklan obat
		10 Regulasi pengawasan penandaan/label dan/atau iklan/promosi produk tembakau
		11 Regulasi pengawasan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor
		12 Regulasi penerapan farmakovigilans
		13 Regulasi tentang persyaratan teknis bahan kosmetik (terutama bahan dilarang) dan cemaran dalam kosmetik
		14 Regulasi pengawasan iklan dan/atau promosi kosmetika
		15 Regulasi pengawasan penandaan kosmetika
		16 Regulasi dan prinsip-prinsip CPOTB dalam pengawasan sarana produksi obat bahan alam dan suplemen kesehatan
		17 Regulasi dan prinsip-prinsip cara distribusi yang baik untuk obat bahan alam dalam pengawasan sarana distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan
		18 Regulasi pengawasan mutu dan keamanan obat bahan alam dan suplemen kesehatan
		19 Regulasi dan tata cara pengawasan iklan obat bahan alami dan suplemen kesehatan
		20 Regulasi dan tata cara pengawasan penandaan obat bahan alam dan suplemen kesehatan
		21 Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran obat bahan alam dan suplemen
		22 Sistem farmakovigilans dan efek tidak diinginkan pada penggunaan obat bahan alam dan suplemen kesehatan
		23 Regulasi terkait prinsip cara peredaran pangan olahan yang baik/sistem jaminan keamanan dan mutu pangan olahan di sarana peredaran
		24 Regulasi terkait pengambilan contoh pangan dan tindak lanjut hasil pengujian pangan
		25 Regulasi terkait KLB keracunan pangan
		26 Regulasi pengawasan iklan dan/atau promosi pangan olahan
		27 Regulasi pengawasan penandaan dan/atau label pangan olahan
		28 Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran pangan
		29 Registrasi produk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan
		30 Pengetahuan dasar uji pra klinik/uji klinik obat bahan alam
		31 Notifikasi produk kosmetika
		32 Penilaian dokumen informasi produk
		33 Pengetahuan tentang registrasi pangan olahan
		34 Pengetahuan tentang label pangan olahan
		35 Dasar-dasar pengujian kimia, pengujian kromatografi, spektrofotometri dan disolusi
		36 Dasar-dasar pengujian mikrobiologi, biologi molekuler, pengujian kualitatif/kuantitatif mikroba spesifik
		37 Pedoman penyusunan metodologi riset, metodologi kualitatif, dan metodologi kuantitatif
		38 Strategi komunikasi yang efektif
		39 Konsep pembuatan rancangan materi penyuluhan/produk KIE yang baik
		40 Strategi informasi dan edukasi
		41 Konsep pengelolaan kegiatan penyuluhan/produk KIE
		42 Pengelola pengaduan dan permintaan informasi obat dan makanan
		43 Konsep pengawasan obat dan makanan
		44 Dasar hukum penyusunan rancangan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan Peraturan Badan POM, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan
131	Pengawas K metrologian Ahli Pertama	1 Analisis kebutuhan kegiatan pengawasan alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan tingkat kesulitan I dan II serta barang dalam keadaan terbungkus berat, jumlah hitungan, gas cair, panjang, dan luas serta satuan ukuran pada produk periklanan komersial yang ditayangkan di media sosial
		2 Administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana
		3 Penyuluhan dan konsultasi kepada pelaku usaha tentang ketentuan metrologi legal
132	Pengawas Koperasi Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Kebijakan pengawasan koperasi
		2 Manajemen perkoperasian
		Kemampuan Khusus:
		1 Pemeriksaan koperasi
		2 Penilaian kesehatan koperasi
		3 Penyusunan laporan hasil pemeriksaan
		4 Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan
133	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Istilah dan definisi terkait bidang keamanan dan mutu pangan hasil pertanian
		2 Peraturan Perundang-Undangan terkait bidang keamanan dan mutu pangan hasil pertanian

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		Kemampuan Khusus:
		1 Kelembagaan keamanan pangan, serta fungsi dan tugasnya terkait bidang keamanan dan mutu pangan hasil pertanian
		2 Standar/Persyaratan Keamanan Pangan
		3 Mekanisme penerapan, pengawasan, dan pengujian di bidang keamanan pangan
		4 Cemaran/Kontaminan dalam Pangan (biologi, kimia, fisik)
134	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Regulasi bidang pakan
		2 Pengertian pakan, bahan pakan, obat hewan, tanaman pakan ternak dan hijauan pakan
		3 Peralatan Pengolahan pakan
		Kompetensi Khusus:
		1 Standar pakan / bahan pakan dan formulasi pakan
		2 Pengujian mutu dan keamanan pakan
		3 Tatacara pengolahan pakan
		4 Proses produksi pakan, penyimpanan bahan pakan dan pakan serta budidaya tanaman pakan ternak
135	Pengawas Mutu Pakan Pemula	Kompetensi Umum:
		1 Regulasi bidang pakan
		2 Pengertian pakan, bahan pakan, obat hewan, tanaman pakan ternak dan hijauan pakan
		3 Peralatan Pengolahan pakan
		Kompetensi Khusus:
		1 Standar pakan / bahan pakan dan formulasi pakan
		2 Pengujian mutu dan keamanan pakan
		3 Tatacara pengolahan pakan
		4 Proses produksi pakan, penyimpanan bahan pakan dan pakan serta budidaya tanaman pakan ternak
136	Pengawas Mutu Pakan Terampil	Kompetensi Umum:
		1 Regulasi bidang pakan
		2 Pengertian pakan, bahan pakan, obat hewan, tanaman pakan ternak dan hijauan pakan
		3 Peralatan Pengolahan pakan
		Kompetensi Khusus:
		1 Standar pakan / bahan pakan dan formulasi pakan
		2 Pengujian mutu dan keamanan pakan
		3 Tatacara pengolahan pakan
		4 Proses produksi pakan, penyimpanan bahan pakan dan pakan serta budidaya tanaman pakan ternak
137	Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	1 Penyiapan bahan perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan
		2 Penyelenggaraan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan
		3 Pemeriksaan legalitas pelaku usaha dan barang, perizinan bidang perdagangan, serta data lain yang diperlukan
		4 Verifikasi bahan dalam pelaksanaan kegiatan penataan jaringan distribusi dan logistik pengelolaan sarana distribusi perdagangan
		5 Analisis kelayakan pelaku usaha, barang, jasa, dan kegiatan perdagangan
		6 Identifikasi dan penyiapan bahan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan tindak pidana pengawasan barang, jasa dan kegiatan perdagangan
138	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Peraturan Kelautan dan Perikanan
		Kemampuan Khusus:
		1 Penyusunan dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan
		2 Pengolahan dan penyusunan proses pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
		3 Pemahaman konsep dasar penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan
		4 Pemahaman konsep dasar dan proses pengoperasian armada pengawasan
		5 Penyusunan dan pelaksanaan standardisasi dan fasilitasi pengawakan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
139	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Peraturan Kelautan dan Perikanan terkait UU
		2 (UU 27/2007 jo UU 1/2014, UU 32/2014, perpu 2/2022, UU 5/1990, UU 16/2023, UU 7/2016, UU 17/1985, UU 5/1983, UU 1/1973, PP 27/2021, PP 21/2021, PP 26/2023, PP 64/2010, PP 62/2010, PP 60/2007, PP 9/2018, PP 32/2019, PP 5/2021, Permen KP dan Kepmen KP)
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengumpulan data dan informasi untuk menyusun dokumen rencana tata ruang laut dan zonasi kawasan
		2 Pembuatan peta tematik
		3 Pengumpulan data dan informasi untuk pengelolaan ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		4 Identifikasi materi penyusunan rencana pengelolaan di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam jangka menengah tingkat lokal, nasional, regional, dan global
		5 Pengumpulan data potensi pemanfaatan sumberdaya di pesisir dan pulau-pulau kecil
		6 Perencanaan pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan
		7 Pengumpulan data daya dukung dan daya tampung kawasan dan/atau ekosistem di wilayah laut pesisir, dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan usaha, pemanfaatan ruang, dan/atau sumber daya
		8 Pengumpulan data dampak pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dan upaya pengelolaannya
		9 Identifikasi data kesesuaian dan kelayakan kawasan konservasi perairan
		10 Identifikasi data kesesuaian perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keaneka ragaman hayati laut pada tingkat spesies dan genetik jenis ikan
		11 Identifikasi materi penyusunan peta jalan (road map) dan cetak biru (blue print) untuk pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil
		12 Identifikasi data penyusunan rancangan pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut, lahan, atau benda muatan asal kapal tenggelam
		13 Pengumpulan dan pengolahan data dan Informasi Materi Teknis Pengelolaan Ekosistem di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil
		14 Identifikasi Data Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
		15 Identifikasi Data Efektivitas Konservasi Spesies dan Genetik Jenis Ikan
		16 Identifikasi data dan informasi untuk penyusunan rekomendasi tindak lanjut pengelolaan sumberdaya
		17 Penyusunan rekomendasi penetapan tingkat risiko kegiatan usaha di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil
		18 Verifikasi teknis dan pembuatan peta kadaster laut
		19 Pengumpulan dan pengolahan data dan Informasi Materi Teknis Kawasan Konservasi Perairan
		20 Analisis data dan informasi terkait kawasan konservasi perairan
		21 Identifikasi dan pengumpulan data dan informasi
140	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	Kompetensi Umum: Peraturan Kelautan dan Perikanan Kompetensi Khusus: 1 Jenis-jenis penyakit ikan 2 Monitoring dan/atau surveilan penyakit ikan 3 Biosecurity 4 Penanganan penyakit 5 Metode pengujian laboratorium 6 Substansi Uji Residu 7 Jenis-jenis obat ikan 8 Kerusakan lingkungan 9 Monitoring lingkungan
141	Pengelola Layanan Operasional	1 Menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional 2 Menyusun jadwal penggunaan peralatan dan layanan operasional 3 Memelihara dan merawat peralatan operasional sesuai dengan prosedur prosedur 4 Mengoperasikan peralatan operasional 5 Memperbaiki peralatan operasional sesuai dengan prosedur
142	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	1 Identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang/jasa 2 Penyusunan spesifikasi teknis dan KAK 3 Penyusunan perkiraan harga pada tahapan pengadaan 4 Perumusan strategi pengadaan, pemaketan, dan cara pengadaan 5 Perumusan organisasi pengadaan 6 Pengelolaan risiko dan risiko dalam perencanaan pengadaan 7 Identifikasi dan pengumpulan data dan informasi 8 Reviu dokumen persiapan pengadaan barang/jasa 9 Penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan, penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran dan pengelolaan sanggah 10 Penyusunan daftar penyedia barang/jasa pemerintah 11 Pengadaan barang/jasa pemerintah dengan persyaratan khusus dan/atau spesifik 12 Risiko pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah 13 Data dan informasi pada pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah 14 Perumusan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah 15 Pembentukan tim pengelola kontrak 16 Pengendalian kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah 17 Serah terima hasil pengadaan barang/jasa pemerintah 18 Evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah 19 Perumusan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dalam bentuk kuitansi, bukti 20 Risiko pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah 21 Identifikasi dan pengumpulan bahan/data/informasi untuk melakukan persiapan dan pengendalian kontrak, serta evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang/jasa

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		22 Perencanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan persiapan pengadaan barang/jasa secara swakelola
		23 Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola
		24 Pengawasan pengadaan barang/jasa secara swakelola
		25 Risiko pengadaan barang/jasa secara swakelola
		26 Identifikasi dan pengumpulan bahan, data, dan informasi dalam pengadaan barang/jasa secara swakelola
143	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama	Kemampuan Umum: Peraturan tentang kebijakan perikanan tangkap Kemampuan Khusus: 1 Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumberdaya Ikan sesuai pedoman kerja petunjuk 2 Rancang Bangun, Standardisasi, Tata Kelola Kapal Perikanan 3 Perlindungan, Standardisasi dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan 4 Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan 5 Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan 6 Perizinan Usaha Perikanan
144	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Sungai 3 Pengelolaan Daerah Pantai 4 Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan 5 Pengelolaan Daerah Irigasi 6 Pengelolaan Daerah Rawa 7 Pengelolaan Daerah Air Tanah & Air Baku 8 Pengelolaan Bendungan 9 Pengelolaan Tampung Air Lainnya (Danau, Situ, Embung)
145	Pengelola Trantibum	Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Penerapan Minimal Kemampuan Khusus: 1 Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota 2 Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP 3 Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah 4 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat 5 Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
146	Pengelola Umum Operasional	1 Mengusulkan kebutuhan perlengkapan kebersihan yang diperlukan 2 Membersihkan ruangan dan peralatannya 3 Menyiapkan ruangan/gedung/lapangan untuk kegiatan-kegiatan kedinasan 4 Melakukan perawatan terhadap peralatan/meubel dan barang-barang yang ada di lingkungan gedung 5 Menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu pimpinan/lembaga dan pegawai 6 Menyiapkan pengantaran barang/dokumen 7 Mengirimkan barang/dokumen sesuai dengan alamat tujuan
147	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Pengantar pemetaan potensi kewirausahaan 2 Pengantar pemetaan data kewirausahaan 3 Pengantar analisis usaha 4 Kolaborasi stakeholder 5 Pengantar pengembangan teknologi informasi usaha 6 Pengantar asesmen teknologi informasi dalam usaha 7 Pengantar inkubasi wirausaha 8 Pengantar pembiayaan wirausaha 9 Pengantar pengembangan permodalan wirausaha 10 Pengantar pengembangan ekosistem bisnis 11 Pengantar kurikulum kewirausahaan 12 Pengantar pengembangan kewirausahaan Kemampuan Khusus: 1 Praktik pemetaan potensi kewirausahaan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		2 Perumusan konsepsi survey
		3 Praktik analisis usaha
		4 Konsultasi bisnis
		5 Praktik konsultasi bisnis
		6 Pendampingan usaha
		7 Praktik pendampingan usaha dalam lingkup perizinan dan pembukuan
		8 Praktik pengembangan usaha baru berbasis teknologi
		9 Praktik pengembangan inkubator wirausaha pemerintah atau swasta
		10 Pengembangan ekosistem bisnis
		11 Kebijakan kewirausahaan
		12 Program pengembangan kewirausahaan
		13 Pemantauan pelaksanaan kebijakan, program, atau kegiatan pengembangan
		14 Praktik pemantauan pengembangan UMK
148	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	Kompetensi Umum: Peraturan terkait jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan turunannya, termasuk Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2021; dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 Kompetensi Khusus: 1 Analisis pengembangan teknologi pembelajaran 2 Perancangan pengembangan sumber belajar 3 Pengembangan sumber belajar berbasis aneka sumber 4 Penerapan model pembelajaran berbasis teknologi 5 Difusi hasil pengembangan teknologi pembelajaran 6 Pengendalian dan evaluasi terhadap penerapan model pembelajaran berbasis teknologi
149	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	Kemampuan Umum: Regulasi tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan air, udara, lahan, ekosistem gambut, pesisir, laut, dan pengelolaan bahan dan limbah B3 Kemampuan Khusus: Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan
150	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	Kemampuan Umum: Regulasi tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan air, udara, lahan, ekosistem gambut, pesisir, laut, dan pengelolaan bahan dan limbah B3 Kemampuan Khusus: Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan
151	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Data umum dan Informasi umum LH dan Kehutanan 2 Data umum dan Informasi umum KSDAE 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan 4 Permen PAN & RB No 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional 5 Permenhut Nomor: 10 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya 6 Peraturan Menteri PANRB nomor 74 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan 7 Undang Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem 8 Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Umum 9 Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Kemampuan Khusus: 1 Peraturan, Data dan Informasi terkait perencanaan PEH di setiap bidang teknis KSDAE 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan KSA dan KPA 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 4 Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 5 Peraturan, Data dan Informasi terkait pelaksanaan kegiatan PEH di setiap bidang teknis KSDAE 6 Peraturan, Data dan Informasi terkait pengembangan kegiatan PEH di setiap bidang teknis KSDAE 7 Peraturan, Data dan Informasi terkait pemantauan dan evaluasi kegiatan PEH di setiap bidang teknis KSDAE 8 Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam 9 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		11 Undang Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan beserta turunannya
		12 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
		13 Dokumen IBSAP 2015-2024
		14 P.14/KSDAE/SET/KSA.1/12/2017
		15 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.81/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
		16 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk- Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
		17 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
		18 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
152	Pengendali Ekosistem Hutan Pemula	Kemampuan Umum:
		1 Wawasan regulasi terkait peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kehutanan
		2 Wawasan regulasi terkait peraturan perundang-undangan pelaksanaan kegiatan pengendali ekosistem hutan
		3 Wawasan regulasi terkait peraturan perundangan jabatan fungsional PEH
		4 Wawasan umum terkait lingkungan hidup dan kehutanan
		5 Wawasan umum terkait pelaksanaan kegiatan pengendalian ekosistem hutan
		6 Wawasan umum terkait jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan
		Kemampuan Khusus:
		1 Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
		2 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
		3 Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
		4 Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
		5 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
		6 Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
		7 Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
		8 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
		9 Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
		10 Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Hutan Lestari
		11 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Hutan Lestari
		12 Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Hutan Lestari
		13 Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengendalian Perubahan Iklim
		14 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengendalian Perubahan Iklim
		15 Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengendalian Perubahan Iklim
		16 Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Perhutanan Sosial
		17 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Perhutanan Sosial
		18 Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Perhutanan Sosial
153	Pengendali Ekosistem Hutan Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
		2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
		3 Undang-undang nomor 5 tentang Konservasi Sumber Dalam Hayati dan Ekosistem tahun 1990
		4 Regulasi bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan
		5 Regulasi bidang Pengelolaan Hutan Lestari
		6 Wawasan umum terkait lingkungan hidup dan kehutanan
		7 Pengetahuan dasar bidang pengendalian ekosistem hutan
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengetahuan teknis bidang Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran
		2 Pengetahuan pengelolaan dan penyajian data spasial dalam rangka konservasi kawasan
		3 Kebijakan dan pengetahuan teknis bidang pengelolaan hutan lestari
		4 Pengetahuan teknis bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan
		5 PermenPANRB No 74 tahun 2021
		6 Kebijakan dan pengetahuan teknis bidang Pengelolaan Hutan Lestari
154	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli	Kompetensi Umum:
		1 Regulasi terkait OPT/DPI

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRe**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
	Pertama	2 Budidaya Tanaman 3 Pengetahuan umum OPT/DPI 4 Pengendalian OPT/ penanganan DPI secara umum Kompetensi Khusus: 1 Pengenalan OPT 2 Pengenalan dan penanganan DPI 3 Musuh Alami 4 Pengendalian OPT 5 Koleksi OPT 6 Pengamatan, peramalan dan analisis OPT
155	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pemula	Kompetensi Umum: 1 Regulasi terkait OPT/DPI 2 Budidaya Tanaman 3 Pengetahuan umum OPT/DPI 4 Pengendalian OPT/ penanganan DPI secara umum Kompetensi Khusus: 1 Pengenalan OPT 2 Pengenalan dan penanganan DPI 3 Musuh Alami 4 Pengendalian OPT 5 Koleksi OPT
156	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil	Kompetensi Umum: 1 Regulasi terkait OPT/DPI 2 Budidaya Tanaman 3 Pengetahuan umum OPT/DPI 4 Pengendalian OPT/ penanganan DPI secara umum Kompetensi Khusus: 1 Pengenalan OPT 2 Pengenalan dan penanganan DPI 3 Musuh Alami 4 Pengendalian OPT 5 Koleksi OPT 6 Pengamatan OPT
157	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Jabatan Fungsional 2 Tugas, Fungsi dan Peran Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat dalam pembangunan Desa, Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 3 Identifikasi khalayak sasaran penggerakan Kemampuan Khusus: 1 Desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi 2 Kelembagaan desa 3 Peraturan perundang-undangan mengenai desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi 4 Kewenangan pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi 5 Konsep Kemandirian Masyarakat 6 Jejaring Kemitraan dan Inovasi 7 Pemberdayaan Masyarakat 8 Sosiologi Perdesaan 9 Perubahan Sosial dan Perubahan Budaya 10 Komunikasi dan Gerakan Perubahan
158	Penghulu Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 3 Pengertian dan Urgensi Moderasi Beragama 4 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 5 Profil Kementerian Agama dan struktur pemerintahan RI dari pusat sampai daerah 6 Cara membaca Al-Qur'an 7 Ketentuan penggunaan tata bahasa dalam bahasa Arab dan Inggris Kemampuan Khusus: 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 3 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan 4 Kepdirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Juknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan 5 PP Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Rujuk 6 Kompilasi Hukum Islam 7 Fikih Munakahat Klasik 8 Fikih Munakahat Kontemporer

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		9 Kandungan Ayat Al-Qur'an tentang Nikah, Talak, dan Rujuk, Keluarga Sakinah, dan Kebimasislamatan
		10 Tugas dan fungsi KUA dalam bidang Kebimasislamatan
		11 PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2019 tentang JF Penghulu, PMA Nomor 16 Tahun 2021 tentang Juknis JF Penghulu, dan Perpres Nomor 73 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu
159	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula	Kompetensi Umum: 1 Peraturan Perundang-Undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2 Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3 Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor 4 Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor 5 Peraturan Perundang-Undangan tentang Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor 6 Peraturan Perundang-Undangan tentang Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor 7 Peraturan Perundang-Undangan tentang Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) pengujian kendaraan bermotor 8 Etika Profesi Penguji Kendaraan Bermotor 9 Pelayanan Prima Kompetensi Khusus: 1 Sistem Kendaraan Bermotor 2 Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor 3 Fasilitas dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor 4 Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor 5 Sistem Informasi dan Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor
160	Penguji Kendaraan Bermotor Terampil	Kompetensi Umum: 1 Peraturan Perundang-Undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2 Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3 Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor 4 Peraturan Perundang-Undangan tentang Kendaraan 5 Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor 6 Peraturan Perundang-Undangan tentang Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor 7 Peraturan Perundang-Undangan tentang Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor 8 Peraturan Perundang-Undangan tentang Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) pengujian kendaraan bermotor 9 Etika Profesi Penguji Kendaraan Bermotor 10 Pelayanan Prima Kompetensi Khusus: 1 Teknik Pemeriksaan Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor 2 Teknik Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor 3 Sistem Kendaraan Bermotor 4 Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor 5 Fasilitas dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor 6 Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor 7 Sistem Informasi dan Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor 8 Teknik Pengukuran Dimensi dan Daya Angkut Kendaraan Bermotor 9 Analisis dan Evaluasi Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor
161	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Perencanaan kegiatan K3 2 Pengujian K3 3 Pengujian Kompetensi K3 4 Pengendalian K3 5 Pengkajian K3 Kemampuan Khusus: 1 Perencanaan kegiatan K3 2 Pengujian K3 3 Pengujian Kompetensi K3 4 Pengendalian K3 5 Pengkajian K3
162	Penguji Mutu Barang Ahli Pertama	1 Pengambilan contoh uji dan pengujian/kalibrasi tingkat kesulitan kompleks serta verifikasi software pengolahan data hasil pengujian/kalibrasi 2 Pengelolaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi 3 Pengendalian pengujian/kalibrasi/sertifikasi/inspeksi 4 Analisa kebutuhan pengembangan, serta verifikasi metode pengembangan metode pengujian/kalibrasi atau pengembangan skema sertifikasi/inspeksi
163	Penguji Mutu Barang Pemula	1 Penyiapan peralatan dalam pelaksanaan pengujian mutu barang/kalibrasi, penyiapan contoh uji dan pengujian tingkat kesulitan I 2 Identifikasi dan pengumpulan bahan untuk pelaksanaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		3 Identifikasi data serta penyiapan peralatan dan/atau bahan yang diperlukan dalam pengendalian mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi
		4 Prosedur pemeliharaan dan perawatan serta perekaman kondisi lingkungan pada ruang dan peralatan pengujian/kalibrasi
164	Penguji Mutu Barang Terampil	1 Pengambilan contoh tingkat kesulitan I, penyiapan contoh dan pengujian/kalibrasi Tingkat kesulitan II serta penghitungan ketidakpastian pengukuran dengan jumlah faktor/variabel ≤ 2
		2 Identifikasi dan pengumpulan bahan untuk pelaksanaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi
		3 Identifikasi data serta penyiapan peralatan dan/atau bahan yang diperlukan dalam pengendalian mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi
		4 Penghitungan persediaan, verifikasi kesesuaian dan penyimpanan bahan pembantu/standar pengujian/kalibrasi
165	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 UU No 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
		2 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
		3 Permenpan RB No 33 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian
		4 Permenhub No. 87 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian Dan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian
		Kemampuan Khusus:
		1 PM 60 Tahun 2012 tentang Standar Teknis Jalur Kereta Api
		2 PM 29 Tahun 2011 tentang Stasiun
		3 PM 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian
		4 PM 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian
		5 PM 50 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian
		6 Rencana kerja, prosedur, tata cara pengujian jalur dan bangunan, fasilitas pengoperasian kereta api serta K3 pelaksanaan pengujian
166	Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang No 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian.
		2 PM Perhubungan Tahun 2011.
		3 Permenpan RB No. 32 Tahun 2022.
		Kemampuan Khusus:
		1 Dinamika sarana.
		2 Sarana Berpenggerak.
		3 Sarana Tanpa Penggerak.
		4 Sarana Peralatan khusus.
		5 Sistem Mekanik Sarana KA.
		6 Sistem Pengereman Sarana KA.
		7 Instrument kabin masinis.
		8 Pola pengoperasian sarana.
		9 KRL
		10 No identitas sarana KA.
		11 Fungsi jabatan penguji sarana KA.
		12 Pengujian statis dan dinamis sarana perkeretaapian.
		13 K3LH.
		14 Perawatan sarana perkeretaapian.
167	Penyuluh Agama Ahli Pertama - Penyuluh Agama Buddha	Kompetensi Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PP 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
		2 PERMENPANRB Nomor 9 Tahun 2021
		3 Wawasan Kebangsaan (politik luar negeri, ideologi Pancasila, Undang-undang)
		4 Moderasi Beragama (Perspektif agama Buddha)
		5 Teori Komunikasi : Proses penyampaian informasi, teknik komunikasi, jenis komunikasi, etika komunikasi, fungsi komunikasi, tujuan komunikasi
		6 Pengoperasian komputer (pengoperasian perangkat lunak, internet, office, perangkat
		Kompetensi Khusus:
		1 Riwayat Siddharta Gautama
		2 Pancasila Buddhis dan Panca Dhamma
		3 Sifat Luhur Buddha
		4 Sila/Moralitas
		5 Puja dan Budaya Buddhis
		6 Agama Buddha dan Pelestarian Lingkungan
		7 Empat Kebenaran Mulia
		8 Hukum Karma dan Tumibal Lahir
		9 Hukum Tilakkhana
		10 Hukum Paticcasamuppada
		11 Misi Pembabaran Dhamma (Buddha mengutus 60 arahat dan misionari Raja Asoka)
		12 Peranan Agama Buddha dalam Kehidupan sehari-hari

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		13 Kitab Suci Tripitaka
		14 Hari Raya Agama Buddha
		15 Tempat Ibadah Agama Buddha
		16 Kesetaraan Gender
		17 Hak Asasi Manusia
		18 Perdamaian dunia
		19 Sejarah Perkembangan Agama Buddha
		20 Candi-candi Buddhis di Indonesia
		21 Hukum tertib kosmis (niyama)
		22 Dasa Punnakiriyavatthu
		23 Paritta Suci dan kegiatan di vihara
		24 Persiapan bimbingan dan penyuluhan
		25 Konsep keluarga Bahagia dalam Agama Buddha
		26 Konsep pelayanan konseling dan pelayanan informasi
		27 Konsep penyusunan rencana kerja bimbingan dan penyuluhan
		28 Materi bimbingan dan penyuluhan
		29 Konsep pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan
		30 Pelayanan dalam bentuk pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan
		31 Instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok binaan
		32 Konsep kerja sama lintas sektoral dengan lembaga pemerintah atau swasta terkait tingkat kecamatan
		33 Prosedur pengembangan model atau metode atau program bimbingan dan penyuluhan bagi kelompok binaan
		34 Konsep penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok binaan
168	Penyuluh Agama Ahli Pertama - Penyuluh Agama Hindu	Kompetensi Umum:
		1 Permenpan RB No 1 Tahun 2023
		2 Permenpan RB No 9 Tahun 2021
		3 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pendirian Rumah Ibadat
		4 Peraturan Menteri Agama No 4 Tahun 2023
		5 Keputusan Dirjen Bimas Hindu No 85 Tahun 2023
		6 Teori Komunikasi
		7 Deteksi dini konflik sosial
		8 Pengoperasian komputer
		Kompetensi Khusus:
		1 Kitab Suci Weda
		2 Sejarah Perkembangan Agama Hindu
		3 Kidung Keagamaan
		4 Sradha dan Bhakti
		5 Susila
		6 Acara
169	Penyuluh Agama Ahli Pertama - Penyuluh Agama Islam	Kompetensi Umum:
		1 Teori Pembinaan dan Pemberdayaan Umat
		2 Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan umat
		3 Pengelolaan Sumber Daya Masyarakat
		4 Regulasi tentang penyelesaian konflik sosial dan keagamaan
		5 Penyelesaian Konflik keagamaan
		6 RAN PE Nomor 7 Tahun 2021 dan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006
		7 Teknologi Informasi dan Komunikasi
		8 Analisis Data
		9 Retorika Dakwah
		10 Kelembagaan, Organisasi, Kepemimpinan, dan Hubungan Masyarakat
		11 Metodologi Bimbingan dan Penyuluhan Agama
		12 Manajemen bimbingan dan penyuluhan agama Islam
		Kompetensi Khusus:
		1 Agama dan Wabah
		2 Dakwah Digital
		3 Intoleransi Beragama
		4 Moderasi Beragama
		5 Kaidah Ushul
		6 Ijtihad
		7 Sumber Hukum Islam
		8 Sejarah Peradaban Islam Indonesia
		9 Dinasti 'Abbasiyah
		10 Dinasti Umayyah
		11 Khulafaur Rasyidin
		12 Sirah Nabawiyah
		13 Shorof

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		14 Nahwu
		15 Mu'amalah
		16 Ibadah
		17 Akhlak Tercela
		18 Akhlak Terpuji
		19 Ilmu tasawuf
		20 Ilmu Kalam
		21 Rukun Iman
		22 Mustholah Hadis
		23 Terjemahan Hadis
		24 Hafalan Hadis
		25 Ulumul Qur'an
		26 Tafsir
		27 Terjemahan Ayat
		28 Taiwid
170	Penyuluh Agama Ahli Pertama - Penyuluh Agama Katolik	Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN 2 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru atau PP Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru 3 Penguatan Moderasi Beragama 4 Pilar Kebangsaan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI Kemampuan Khusus: 1 Perjanjian Lama 2 Perjanjian Baru 3 Sejarah Gereja 4 Sifat-sifat Gereja 5 Sepuluh Perintah Allah 6 Lima Tugas Gereja 7 Sakramen 8 Liturgi 9 Dokumen Konsili Vatikan II 10 Ajaran Sosial Gereja
171	Penyuluh Agama Ahli Pertama - Penyuluh Agama Khonghucu	Kemampuan Umum: 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama 2 Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk teknis Penyuluh Agama Khonghucu Non Pegawai Negeri Sipil 3 Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Penyuluh 4 Moderasi Beragama Kemampuan Khusus: 1 Konsep Yin Yang tentang Tian, Di, Ren dan Keimanan Yang Pokok serta Delapan Pengakuan Iman 2 Dasar-Dasar Kitab Suci, Pengertian Agama Dalam Kitab Suci, Ayat-Ayat Suci serta Spirit Nilai Kebajikan dalam Kitab Suci 3 Tata Ibadah, Berdoa, Bersembahyang, Rumah Ibadah dan Rohaniwan Agama Khonghucu 4 Prinsip dan Pedoman Perilaku Junzi 5 Sejarah dan Keteladanan Para Nabi, Peran MATAKIN serta mewujudkan masyarakat Da Tong (Kebersamaan Agung)
172	Penyuluh Agama Ahli Pertama - Penyuluh Agama Kristen	Kompetensi Umum: 1 UUD 1945 2 UU ASN 3 Sasaran pelayanan Penyuluhan dan Metode Penyuluhan 4 Hak dan kewajiban Penyuluh Agama Kristen dan kode etik Penyuluh Agama Kristen 5 Pancasila dalam pandangan hidup bangsa 6 Pancasila dalam perspektif Kristen 7 Implementasi nilai-nilai Pancasila Kompetensi Khusus: 1 Allah menciptakan alam semesta 2 Allah menciptakan manusia 3 Arti pemeliharaan Allah 4 Jangkauan pemeliharaan Allah 5 Inisiatif Allah menyelamatkan manusia 6 Karya keselamatan melalui Karya keselamatan melalui Yesus Kristus 7 Keselamatan Allah bersifat Universal dan pribadi 8 Allah memelihara kehidupan dalam Roh Kudus 9 Kasih Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan 10 Allah membimbing, mendamaikan dan menopang umat-Nya dalam sehat dan sakit

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		11 Mendidik umat melalui pelayanan pendidikan gerejawi
		12 Menjadi Jemaat yang misioner
		13 Bersaksi melalui perkataan dan perbuatan
		14 Pelayan Yang berhati Hamba
		15 Gereja menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi umat untuk memuliakan Allah
		16 Gereja menerima dan mengasihi semua orang
		17 Gereja dalam arak-arakan gerakan Oikoumene
		18 Pelayanan di luar gereja
		19 Alkitab adalah Firman Allah
		20 Keaslian kitab-kitab Perjanjian Lama
		21 Keaslian kitab-kitab Perjanjian Baru
		22 Alkitab penuntun hidup orang beriman dan pelita dalam kegelapan
		23 Nilai Kristiani berdasarkan Galatia 5:22-23, Mazmur dan Kitab Amsal
		24 Gereja, Kemajemukan dan multikulturalisme
		25 Moderasi beragama dalam pandangan Alkitab: Hidup Rukun dan Damai
		26 ICT dan perkembangannya (evolusi dan inovasi ICT)
		27 Menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, mencegah dan mengantisipasi
		28 Pendidikan dalam Keluarga Kristen
		29 Peran dan Tanggung Jawab Gereja dalam Pendidikan
		30 Sikap Orang Kristen terhadap Kesetaraan dan keadilan Gender
		31 Penyimpangan Seksual, pencegahan dan antisipasi
		32 Praktik demokrasi dalam perspektif iman Kristen
		33 Faktor penghambat damai sejahtera
		34 Krisis dalam kehidupan Lansia
		35 Ciri-ciri orang Kristen pembawa damai sejahtera
173	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Kemampuan Umum
		1 Budaya Hukum
		2 Pengetahuan Umum
		3 Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI
		4 Hukum Pidana
		5 Hukum Perdata
		6 ASN
		Kemampuan Khusus
		1 Penyuluhan Hukum
		2 Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI
		3 Desa Sadar Hukum
		4 Kelompok Keluarga Sadar Hukum
		5 Hukum Perdata
		6 Peraturan Perundang-Undangan
		7 Pelayanan Publik
		8 Penyuluh Hukum
		9 Komunikasi
		10 Bantuan Hukum
		11 Sikap, Etika dan Perilaku
174	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama	Kemampuan Umum
		1 Perencanaan Penyuluhan Kehutanan
		2 Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan
		3 Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan
		4 Pengembangan sistem penyuluhan kehutanan
		5 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan
		Kemampuan Khusus
		1 Perencanaan Penyuluhan Kehutanan
		2 Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan
		3 Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan
		4 Pengembangan sistem penyuluhan kehutanan
		5 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan
175	Penyuluh Kehutanan Pemula	Kemampuan Umum
		1 Perencanaan Penyuluhan Kehutanan
		2 Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan
		3 Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan
		4 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan
		Kemampuan Khusus
		1 Perencanaan Penyuluhan Kehutanan
		2 Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan
		3 Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan
		4 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan
176	Penyuluh Kehutanan Terampil	Kemampuan Umum
		1 Perencanaan Penyuluhan Kehutanan
		2 Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		3 Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan
		4 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan
		Kemampuan Khusus
		1 Perencanaan Penyuluhan Kehutanan
		2 Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan
		3 Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan
		4 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan
177	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	Kemampuan Umum
		1 Wawasan regulasi terkait lingkungan hidup dan kehutanan
		2 Wawasan umum terkait Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup
		3 Wawasan umum terkait lingkungan hidup dan kehutanan
		Kemampuan Khusus
		1 Penanganan sampah laut
		2 Pengaturan pemulihan non institusi
		3 Pengelolaan B3
		4 Pengelolaan limbah B3
		5 Pengelolaan limbah non B3
		6 Pengelolaan sampah
		7 Pengelolaan sampah oleh produsen
		8 Pengelolaan sampah pada Bank Sampah
		9 Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
		10 Pengelolaan sampah spesifik
		11 Pengendalian emisi udara
		12 Pengendalian gas rumah kaca
		13 Pengendalian pencemaran air
		14 PROPER
178	Penyuluh Narkoba Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Pengetahuan dasar tentang ruang lingkup Narkotika, Psikotropika, Bahan Adiktif dan prekursor narkotika
		2 Pengetahuan tentang tugas dan fungsi BNN
		Kompetensi Khusus:
		1 Menyampaikan informasi P4GN yang efektif
		2 Keterampilan dasar dalam penyuluhan narkotika
		3 Kemampuan melakukan penerapan metode, teknik dan model penyuluhan Narkotika
		4 Kemampuan untuk mengetahui gambaran umum tentang sasaran penyuluhan
		5 Kemampuan untuk membuat laporan dan mengevaluasi penyuluhan Narkotika
179	Penyuluh Perikanan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 45 Tahun 2009
		2 UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
		3 UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengolahan data dan informasi kelembagaan sektor kelautan dan perikanan
		2 Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan sektor kelautan dan perikanan
		3 Materi Penyuluhan dalam berbagai media
		4 Penyusunan dan Penerapan Metoda dan Materi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
		5 Kemitraan Usaha Kelautan dan Perikanan
		6 Peningkatan produktivitas dan skala usaha Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha Perikanan
180	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	Kemampuan Umum
		1 Pengetahuan Umum Tentang Industri dan Kebijakan Industri
		2 Pohon Industri
		3 Klasifikasi Industri
		4 Perijinan Usaha
		5 Pengetahuan Umum Tentang ASN
		Kemampuan Khusus:
		1 Standar Industri
		2 Kewirausahaan
		3 Industri Kecil dan Menengah
		4 Manajemen Operasional (Produksi)
		5 Manajemen Pemasaran
		6 Pengelolaan program penyuluhan usaha indag
		7 Penyusunan dan Penerapan Metoda dan Materi Penyuluhan Usaha Indag
		8 Pendampingan dan/atau konsultasi usaha indag
181	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Pelaksanaan Penyuluhan
		2 Evaluasi Penyuluhan
		Kompetensi Khusus:
		1 Pelaksanaan Penyuluhan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
182	Penyuluh Pertanian Terampil	2 Evaluasi Penyuluhan
		3 Metode penyuluhan pertanian
		Kompetensi Umum:
		1 Pelaksanaan Penyuluhan
		2 Evaluasi Penyuluhan
		Kompetensi Khusus:
183	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	1 Pelaksanaan Penyuluhan
		2 Evaluasi Penyuluhan
		3 Metode penyuluhan pertanian
		Kompetensi Umum:
		1 Penyiapan bahan perumusan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial
		2 Advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial serta monitoring dan evaluasi hasil advokasi
184	Perawat Ahli Pertama	Kompetensi Khusus:
		1 Pelaksanaan tahapan penyusunan perencanaan penyuluhan sosial sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis dan bimbingan
		2 Penyajian data dan informasi terkait pemetaan potensi kerawanan sosial daerah
		3 Pelaksanaan persiapan terkait penyelenggaraan penyuluhan sosial
		4 Pelaksanaan pengembangan kualitas penyuluhan sosial
		5 Pelaksanaan pengembangan kerjasama penyuluhan kemasyarakatan
		Kemampuan Umum:
		1 Praktik Keperawatan Berdasarkan Etik (Standar Profesi perawat)
		2 Praktik Keperawatan Berdasarkan Legal (Standar Profesi Perawat)
		3 Praktik Keperawatan Berdasarkan Peka Budaya (Standar Profesi Perawat)
		4 Area Praktik Keperawatan Profesional (Standar Profesi Perawat)
		5 Area Kepemimpinan dan Manajemen (Standar Profesi Perawat)
6 Area Pendidikan dan Penelitian (Standar Profesi Perawat)		
185	Perawat Terampil	7 Area Pengembangan Kualitas Personal dan Profesional (Standar Profesi Perawat)
		Kemampuan Khusus:
		1 Asuhan Keperawatan Medikal Bedah (Kamus Kompetensi)
		2 Asuhan Keperawatan Maternitas (Kamus Kompetensi)
		3 Asuhan Keperawatan Anak (Kamus Kompetensi)
		4 Asuhan Keperawatan Jiwa (Kamus Kompetensi)
		5 Asuhan Keperawatan Komunitas (Kamus Kompetensi)
		Kemampuan Umum:
		1 Praktik keperawatan berdasarkan Etik, Legal dan Peka Budaya
		2 Area Praktik Keperawatan Profesional
		Kemampuan Khusus:
		1 Pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat
2 Asuhan keperawatan medikal bedah		
3 Asuhan keperawatan maternitas		
4 Asuhan Keperawatan Anak		
5 Asuhan Keperawatan Jiwa		
6 Asuhan Keperawatan Komunitas		
186	Perekam Medis Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
		2 Kebijakan Pelayanan RME di Fasyankes (PMK 24/2022 tentang RM, KMK 1423, PMK 13 tentang 1 sehat, KMK 1559 2022)
		3 KMK No. 312 Tahun 2020
		4 Hasil Kongres IX PORMIKI Tahun 2018
		5 Aspek Hukum Rekam Medis
		6 Aspek Manajemen secara umum
		Kemampuan Khusus:
		1 Manajemen Data
		2 Kodifikasi Klinis Sistem Pembiayaan Kesehatan
		3 Statistik dan Pelaporan Data Pasien
		4 Pelayanan Pendaftaran Pasien
5 Penjaminan Mutu Pelayanan Rekam Medis		
6 Pelepasan Informasi Kesehatan		
187	Perekam Medis Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Tenaga kesehatan
		2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
		3 Jabatan Fungsional Perekam medis
		4 Menjelaskan Dasar Hukum Kebijakan Pelayanan RME di Fasyankes
		5 Klasifikasi dan perijinan rumah sakit
		6 Puskesmas
		7 KMK no.312 Tahun 2020, Hasil Kongres IX PORMIKI Tahun 2018
8 Aspek Hukum Rekam Medis		

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		9 Permenkes 1171 tahun 2011 dan Permenkes 31 tahun 2019
		10 Budaya kerja dan nilai-nilai anti korupsi
		11 Kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain
		12 Tanggap terhadap kejadian bencana
		Kemampuan Khusus:
		1 Identifikasi data sosial pasien
		2 Registrasi Pendaftaran
		3 Indeks utama pasien
		4 Penomoran rekam medis
		5 Penyiapan rekam medis
		6 Pemesanan rekam medis pasien lama
		7 pengumpulan data pelayanan pendaftaran pasien
		8 pengolahan data pelayanan pendaftaran pasien
		9 penyajian data pelayanan pendaftaran pasien
		10 instrumen untuk mengolah data pelayanan pendaftaran pasien
		11 instrumen untuk menyajikan data pelayanan pendaftaran pasien
		12 analisis hasil pengolahan data pelayanan pendaftaran pasien
		13 penyajian hasil pengolahan data pelayanan pendaftaran pasien
		14 menyusun dan melaporkan hasil analisis data pelayanan pendaftaran pasien dan memberikan rekomendasi untuk pengambilan keputusan terhadap pelayanan pendaftaran
		15 evaluasi hasil laporan analisis dan rekomendasi untuk perbaikan cara kerja pelayanan pendaftaran pasien yang lebih efektif
		16 pedoman, standar, dan prosedur pelaksanaan pelayanan pendaftaran pasien
		17 mensosialisasikan dan menyakinkan pengguna untuk implementasikan pedoman standar prosedur pelayanan pendaftaran pasien yang dilakukan perbaikan
		18 konsep dan metode tata kelola pelayanan pendaftaran pasien
		19 kegiatan menyiapkan perlengkapan penyediaan rekam medis untuk berobat
		20 membuat bukti petunjuk keluar (outguide) sesuai dengan ketentuan
		21 pengambilan kembali (retrieval) rekam medis
		22 lokasi penjajaran
		23 pengambilan rekam medis
		24 penyisipan outguide
		25 merapikan rekam medis
		26 penyortiran rekam medis
		27 analisis kegiatan pengelolaan rekam medis
		28 penyajian kegiatan pengelolaan rekam medis
		29 perumuskan kegiatan pengelolaan rekam medis
		30 pendistribusian rekam medis berdasarkan permintaan rekam medis
		31 pencatatan pada buku ekspedisi
		32 melakukan mendistribusikan rekam medis sesuai permintaan
		33 pelaksanaan bimbingan penyimpanan Rekam medis untuk berbagai kepentingan
		34 kegiatan pelestarian rekam medis di ruang penyimpanan
		35 konsep dan metode tata kelola pengelolaan rekam medis di ruang penyimpanan
		36 mengolah data hasil kodifikasi klinis
		37 audit hasil laporan kodifikasi klinis
		38 pengolahan data hasil kodifikasi klinis sistem pembiayaan kesehatan
		39 konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi pengolahan kodifikasi klinis sistem pembiayaan kesehatan
		40 pengolahan data pelayanan dan program kesehatan
		41 evaluasi data pelayanan kesehatan dan pelaporan pelayanan kesehatan
		42 Menyediakan data pelayanan dan program kesehatan untuk keperluan pihak lain
		43 konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan statistik dan pelaporan data pasien
		44 konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur penjaminan mutu pelayanan rekam medis berdasarkan pedoman
		45 Penyelenggaraan penjaminan mutu pelayanan rekam medis
		46 pelayanan peminjaman rekam medis untuk pihak internal dan eksternal
188	Perencana Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Teknis Perencanaan Pembangunan Tingkat Dasar
		Kemampuan Khusus:
		1 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tingkat Dasar
		2 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Tingkat Dasar
		3 Perencanaan Pembangunan Bidang Spasial Tingkat Dasar
189	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia
		2 Manajemen ASN dan Pembentukan Undang-Undang
		Kemampuan Khusus:
		1 Kelembagaan DPR
		2 JF PL Ahli Pertama/JF APL Terampil dan Penulisan sesuai PUEBI

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		3 Instansi Pembina dan Instansi Pengguna JFPL/JFAPL
190	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Ruang lingkup humas
		2 Etika kehumasan
		Kemampuan Khusus:
		1 Manajemen isu
		2 Manajemen komunikasi
		3 Karakteristik media
		4 Media baru
		5 Komunikasi massa
		6 Publisitas
		7 Penulisan kehumasan
		8 Kegiatan-kegiatan humas
		9 Komunikasi organisasi
		10 Komunikasi interpersonal
		11 Teori komunikasi
12 Model komunikasi		
13 Metode penelitian komunikasi		
14 Fotografi		
15 Komunikasi visual		
191	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Ruang lingkup humas
		2 Etika kehumasan
		Kemampuan Khusus:
		1 Manajemen isu
		2 Manajemen komunikasi
		3 Karakteristik media
		4 Media baru
		5 Komunikasi massa
		6 Publisitas
		7 Penulisan kehumasan
		8 Kegiatan-kegiatan humas
		9 Komunikasi organisasi
10 Komunikasi interpersonal		
11 Model komunikasi		
12 Fotografi		
13 Komunikasi visual		
192	Pranata Komputer Ahli Pertama	Kemampuan Khusus:
		1 Manajemen Layanan TI
		2 Pengelolaan data
		3 Manajemen Risiko
		4 Infrastruktur TI/sistem jaringan komputer
5 Sistem Informasi/Pengolahan Data/Area TI Khusus		
193	Pranata Komputer Terampil	Kemampuan Khusus:
		1 Pengelolaan data
		2 Infrastruktur TI/sistem jaringan komputer
194	Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama	3 Sistem Informasi/Pengolahan Data/Area TI Khusus
		1 Verifikasi Standar Ukuran Metrologi Legal
195	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	2 Penanganan dan pengelolaan laboratorium metrologi legal
		Kompetensi Umum:
		1 UU Nakes No. 36 Tahun 2014 : Peraturan terkait Lab
		2 PMK No. 42 Tahun 2015 - Peraturan terkait Lab
		3 K3, Biosafety dan Biosecurity
		4 Pengelolaan Limbah
		5 Permenkes No. 69 Tahun 2015 - Manajemen Lab
		6 Kode Etik Profesi
		7 Pengendalian Infeksi di Lab/nosokomial
		8 Pengendalian dan pemantapan mutu
Kompetensi Khusus:		
1 Flebotomi vena, kapiler dan arteri		
2 Penilaian kualitas spesimen darah		
3 Pengambilan spesimen selain darah (urin, sputum, feses, cairan tubuh)		
4 Penilaian kualitas spesimen urin dan feses		
5 Penilaian kualitas spesimen sputum dan cairan tubuh		
6 Manajemen spesimen - penyimpanan spesimen		
7 Manajemen spesimen - pengiriman sampel rujukan		
8 Prosesing spesimen darah		
9 Prosesing spesimen selain darah (urin, sputum, feses, cairan tubuh)		
10 Spesimen untuk pemeriksaan laboratorium hispatologi dan sitologi		

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		11 Manajemen spesimen - persiapan pasien untuk pemeriksaan laboratorium
		12 Kalibrasi alat laboratorium
		13 Persiapan pemeriksaan - pengujian alat untuk pemeriksaan hematologi
		14 Persiapan pemeriksaan - pengujian reagensia untuk pemeriksaan hematologi
		15 Persiapan pemeriksaan - pengujian alat untuk pemeriksaan kimia darah
		16 Persiapan pemeriksaan - pengujian reagensia untuk pemeriksaan kimia darah
		17 Persiapan pemeriksaan - pengujian alat untuk pemeriksaan urinalisis
		18 Persiapan pemeriksaan - pengujian reagensia untuk pemeriksaan urinalisis
		19 Persiapan pemeriksaan - pengujian alat untuk pemeriksaan mikrobiologi
		20 Persiapan pemeriksaan - pengujian reagensia untuk pemeriksaan mikrobiologi
		21 Persiapan pemeriksaan - pengujian alat untuk pemeriksaan sito-histoteknologi
		22 Persiapan pemeriksaan - pengujian reagensia untuk pemeriksaan sito-histoteknologi
		23 Metode pemeriksaan hematologi
		24 Metode pemeriksaan kimia klinik
		25 Metode pemeriksaan mikrobiologi
		26 Metode pemeriksaan imuno-serologi
		27 Manajemen peralatan lab medik - pemeliharaan mikroskop
		28 Manajemen peralatan lab medik - penanganan masalah pada mikroskop
		29 Urinalisis
		30 Kimia Darah
		31 Analisis Gas Darah
		32 Pemeriksaan hematologi lengkap
		33 Pemeriksaan penyaring hemostasis
		34 Pemeriksaan imunologi dasar
		35 Sediaan mikroskopis - pembuatan sediaan
		36 Sediaan mikroskopis - pewarnaan sediaan
		37 Sediaan mikroskopis - pembacaan dan interpretasi secara mikroskopis
		38 Pemeriksaan sedimen urin
		39 Pemeriksaan toksikologi klinik
		40 Pemeriksaan NAPZA
		41 Pemeriksaan imunohematologi
		42 Pemeriksaan bakteriologi sederhana
		43 Pemeriksaan bakteriologi kompleks
		44 Pemeriksaan mikologi sederhana
		45 Pemeriksaan parasitologi sederhana
		46 Pemeriksaan sitohistoteknologi
		47 Pemeriksaan analisis cairan tubuh
		48 Pemeriksaan diagnostik molekuler
		49 Pemeriksaan POCT
		50 Penulisan dan interpretasi hasil pemeriksaan
		51 Verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan
		52 Sterilisasi dan desinfeksi
196	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	Kemampuan Umum: Konsep K3, Biosafety, Pemantapan Mutu, Pengelolaan sample, Pengelolaan limbah, manajemen laboratorium, Peraturan terkait tentang Laboratorium, termasuk Kode Etik dan Pengendalian Infeksi di Laboratorium
		Kemampuan Khusus: Pelaksanaan pelayanan laboratorium patologi klinik, mikrobiologi klinik, patologi anatomik, biologi molekuler, kesehatan masyarakat, dan biologi kedokteran sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis
197	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama	1 Perencanaan kegiatan laboratorium 2 Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan 3 Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan 4 Pengevaluasian sistem kerja laboratorium 5 Pengembangan kegiatan laboratorium
198	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil	1 Perencanaan kegiatan laboratorium 2 Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan 3 Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan 4 Pengevaluasian sistem kerja laboratorium
199	Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula	Kompetensi Umum: 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan 2 Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan 5 Permenpan No. 33 Tahun 2021

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		6 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Kerja Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
		7 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Sarana Penyelenggaraan Pencarian Pertolongan Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		8 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan
		9 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Wilayah Pencarian dan Pertolongan Indonesia
		10 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan
		11 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Latihan Pencarian dan Pertolongan
		12 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Standar Kebutuhan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		13 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Waktu Respons dan Waktu Tempuh Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan
		14 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara
		15 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengakreditasi Nasional Tim Pencarian dan Pertolongan Reruntuhan dan Bangunan
		Kompetensi Khusus:
		1 Teknik operasi SAR di gunung dan hutan
		2 Teknik operasi SAR di ketinggian
		3 Teknik operasi SAR di perairan
		4 Teknik pertolongan pertama
200	Pranata Pencarian dan Pertolongan Terampil	Kompetensi Umum:
		1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan
		2 Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan
		5 Permenpan No. 33 Tahun 2021
		6 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Kerja Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
		7 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Sarana Penyelenggaraan Pencarian Pertolongan Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		8 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan
		9 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Wilayah Pencarian dan Pertolongan Indonesia
		10 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan
		11 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Latihan Pencarian dan Pertolongan
		12 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Standar Kebutuhan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		13 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Waktu Respons dan Waktu Tempuh Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan
		14 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara
		15 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengakreditasi Nasional Tim Pencarian dan Pertolongan Reruntuhan dan Bangunan
		Kompetensi Khusus:
		1 Teknik operasi SAR di gunung dan hutan
		2 Teknik operasi SAR di ketinggian
		3 Teknik operasi SAR di perairan
		4 Teknik pertolongan pertama
201	Pranata Siaran Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik 3 P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) 4 Kode Etik Jurnalistik Nomor 6 Tahun 2008 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Kemampuan Khusus: 1 Komunikasi massa 2 Jurnalistik 3 Profesi Siaran 4 Proses Produksi Siaran 5 Program Siaran 6 Artistik 7 Desain Grafis 8 Animasi 9 Videografi 10 Dasar-Dasar Komunikasi 11 Penulisan sesuai Kaidah Bahasa Indonesia 12 Agenda Setting Produksi dan Penyiaran 13 Survey Lokasi 14 Kelayakan Materi Produksi 15 Penulisan Naskah 16 Tim Produksi 17 Media Online 18 Tugas-tugas Profesi 19 Membaca Naskah 20 Pembuatan Program Siaran 21 Evaluasi Siaran 22 Format Program
202	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	Kemampuan Umum: 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 4 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Kemampuan Khusus: 1 Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur 2 Pengelolaan Administrasi Pelayanan Kepegawaian ASN 3 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN 4 Pengadaan ASN 5 Pangkat dan Jabatan ASN 6 Pengembangan Karier ASN 7 Pola Karier ASN 8 Promosi ASN 9 Mutasi ASN 10 Penugasan ASN 11 Pengembangan Kompetensi ASN 12 Penilaian Kinerja ASN 13 Disiplin ASN 14 Penghargaan ASN 15 Penggajian, Tunjangan, dan Fasilitas ASN 16 Pemberhentian ASN 17 Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN 18 Perlindungan ASN 19 Cuti ASN 20 Sistem Informasi ASN
203	Pranata Trantibum	Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Penerapan Minimal Kemampuan Khusus: 1 Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota 2 Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP 3 Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah 4 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		5 Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
204	Psikolog Klinis Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Kode Etik sebagai Psikolog Klinis 2 Jenjang pangkat psikolog klinis 3 Masa jabatan sebagai psikolog klinis 4 Penunjang tugas dan angka kredit Kompetensi Khusus: 1 Asesmen Psikologi Klinis 2 Interpretasi psikologi klinis 3 Pedoman diagnosis psikologi klinis 4 Pedoman intervensi psikologi klinis
205	Pustakawan Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Pembudayaan Kegemaran Membaca 2 Sejarah Dunia Pustakawan Kemampuan Khusus: 1 Pengembangan Koleksi Perpustakaan 2 Pengorganisasian Bahan Perpustakaan dan Pengetahuan 3 Pengembangan Sistem Kepustakawanan 4 Pelayanan Informasi dan Referensi 5 Promosi Perpustakaan 6 Pengembangan Literasi Informasi
206	Radiografer Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Pengumpulan data kebutuhan BMHP 2 Penyusunan program kerja dan laporan kinerja pelayanan radiologi sebagai anggota 3 Pembuatan daftar tunggu pelayanan radiasi pasien baru di runag pesawat radioterapi 4 Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC) radiologi bekerjasama dengan mitra terkait sebagai anggota 5 Pengukuran parameter kualitas citra, nilai paparan radiasi di radiologi Kemampuan Khusus: 1 Tindakan pemeriksaan CT scan kepala, sela tursica, mastoid, tulang-tulang wajah (facial bone), rahang atas (maxilaris), rahang bawah (mandibularis), tulang belakang (columna vertebralis), panggul (pelvis), nasopharing, leher, thorax, whole abdomen, abdomen atas, abdomen bawah, abdomen multiphase, ekstremitas atas (extremity superior), ekstremitas bawah (extremity inferior) 2 Tindakan pemeriksaan MRI kepala 3 Tindakan pemeriksaan MRI MRA otak 4 Tindakan pemeriksaan MRI MRV otak TOF 5 Tindakan pemeriksaan MRI ekstremitas bawah, ekstremitas atas, elbow joint, shoulder joint, pedis kasus OA, knee joint, pedis kasus plantar capitis, ankle joint, vertebralis 6 Tindakan pemeriksaan USG abdomen meliputi liver, kandung empedu, pancreas, spleen dan ginjal 7 Tindakan pemeriksaan USG sistem urinaria dan sistem reproduksi, sistem vascular dan kelenjar, sistem pencernaan, obgyn 8 Tindakan pemeriksaan USG dengan doppler non kontras 9 Tindakan persiapan pemeriksaan radioterapi 10 Tindakan persiapan radioterapi dengan simulasi penyinaran 11 Tindakan persiapan radioterapi dengan perencanaan terapi radiasi eksternal dan penyinaran 12 Tindakan radioterapi eksternal penyinaran 13 Tindakan radioterapi brakhiterapi 14 Pemeriksaan kedokteran nuklir 15 Pemeriksaan kedokteran nuklir wholebody dengan SPECT gamma camera lymphoscintigrafi
207	Radiografer Terampil	Kemampuan Umum: 1 Standar Kompetensi dan Kode Etik Radiografer 2 SKKNI/Kepmenaker 237/2020 3 Vinnita Meril, Bontrager 4 Buku teks Komunikasi Efektif dan Efisien 5 Buku Teks Manajemen Logistik 6 Buku Manajemen Radiologi 7 Buku Teks K3 Radiologi 8 Buku Teks Proteksi Radiasi 9 Buku Teks Manajemen Mutu Radiologi 10 Buku Teks QA dan QC Radiologi Kemampuan Khusus: 1 Standar Kompetensi dan Kode Etik Radiografer 2 SKKNI/Kepmenaker 237/2020 3 Vinnita Meril, Bontrager 4 Buku Teks Pemeriksaan Radiografi 5 Buku Teks Pemeriksaan CT Scan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		6 Snoeck, CT Scan
		7 Buku Teks K3 Radiologi
		8 Buku Teks Proteksi Radiasi
208	Refraksionis Optisien Terampil	Kompetensi Umum:
		1 Standar Profesi Refraksionis Optisien,
		2 Standar Pelayanan Refraksionis Optisien
		3 Regulasi dan perundang-undangan, Kode Etik Profesi.
		Kompetensi Khusus:
		1 Pelayanan Fungsi Penglihatan
		2 Pelayanan Teknologi Optik
		3 Pelayanan Diagnostik
		4 Pelayanan Terapeutik
209	Statistisi Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Statistik Nasional (SSN)
		Kemampuan Khusus:
		1 Statistika Dasar
		2 Pengumpulan Data
		3 Teknik Sampling I
		4 Teknik Penyusunan Kuesioner
		5 Pengolahan Data
		6 Metode Statistik Menengah
		7 Analisis dan Diseminasi
210	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Dasar Informasi Geospasial
		Kemampuan Khusus:
		1 Teretris
		2 Fotogrametri
		3 Penginderaan Jauh
		4 SIG dan kartografi
		5 Geografi/Kewilayahan
211	Surveyor Pemetaan Terampil	Kemampuan Umum:
		Dasar Informasi Geospasial
		Kemampuan Khusus:
		1 Teretris
		2 Fotogrametri
		3 Penginderaan Jauh
		4 SIG dan kartografi
212	Teknisi Akuakultur Pemula	Kemampuan Umum:
		Pedoman dan aturan tentang pembudidayaan ikan
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengelolaan sarana, prasarana, dan kawasan perikanan budidaya
		2 Pengelolaan perbenihan ikan
		3 Pembinaan unit pembenihan ikan
		4 Pengelolaan sertifikasi bidang perikanan budidaya
213	Teknisi Akuakultur Terampil	Kemampuan Umum:
		Pedoman dan aturan tentang pembudidayaan ikan
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengelolaan sarana, prasarana, dan kawasan perikanan budidaya
		2 Pengelolaan perbenihan ikan
		3 Pembinaan unit pembenihan ikan
		4 Pengelolaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan
		5 Pengelolaan sertifikasi bidang perikanan budidaya
		6 Pengelolaan dan rehabilitasi lingkungan budidaya
214	Teknisi Elektromedis Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 KMK 314 Tahun 2020 Standar Profesi Elektromedis
		2 Wawasan Kebangsaan
		3 Pancasila
		4 Undang-Undang Dasar 1945
		Kompetensi Khusus:
		1 Pedoman Pengelolaan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Tahun 2015
		2 SOP pemeliharaan alat elektromedik teknologi tinggi
		3 Pedoman pemeliharaan alat elektromedik teknologi menengah
		4 Metode Kerja Kalibrasi
		5 Data spesifikasi alat elektromedik teknologi sederhana
		6 Pedoman Pengelolaan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Tahun 2015
		7 SOP Pengoperasian alat ukur standar
		8 Pedoman Uji Antara
		9 Operational Manual
		10 Permenkes 54 Tahun 2015 tentang pengujian dan kalibrasi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		11 Service Manual
215	Teknisi Elektromedis Terampil	Kemampuan Umum: 1 KMK 314 th 2020 standar profesi elektromedis 2 Wawasan kebangsaan 3 Pancasila 4 Undang-Undang Dasar 1945 5 Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek 6 Registrasi tenaga kesehatan 7 Izin dan penyelenggaraan praktik elektromedis Kemampuan Khusus: 1 Meja operasi manual/lampu operasi mobile 2 Spygmanometer Digital/Spygmanometer Aneroid/Baby Scale/Snellen Chart/Fetal Detector/Spirometer/Audiometer/EKG/Vital Sign Monitor/Electric Bed/CTG/Pulse Oxymeter Table Top/Holter Monitor/Slit Lamp/Ultrasonography/EEG/Treadmill/Defibrillator 3 Mikroskop/Centrifuge/Stirrer/Shaker Laboratory/Dry Incubator/Waterbath Laboratory/Refrigerated Centrifuge 4 Blue Light Phototherapy/Infrared Lamp/Parafin Bath/Microwave Diathermi/Ultrasound Terapy/Shortwave Diathermi/Traksi Unit 5 Film Viewer/Dental X-Ray/Authomatic Processing Film (APF)/X-Ray Mobile/Panoramic Dental Unit/General X-Ray Unit 6 UV Sterilizer/Ultrasonic Cleaner 7 Infusion Pump/Syringe Pump/Baby Incubator/Infant Radiant Warmer/Authomatic External Defibrillator (AED)/Hemodialisa/Ventilator/Patient Monitor/Defibrillator 8 Alat Bedah dan Anestesi/Diagnostik Laboratorium Klinik/Life Support/Terapi/Radiologi/Disinfeksi dan Sterilisasi 9 Alat Diagnostik Sederhana/Menengah 10 Alat Laboratorium Klinik Sederhana/Menengah 11 Alat Life Support Sederhana/Menengah 12 Alat Terapi Sederhana 13 Laboratorium Klinik/Life Support/Terapi/Radiologi/Bedah dan Anestesi/Disinfeksi dan Sterilisasi
216	Teknisi Gigi Terampil	Kemampuan Umum: 1 Kepmenaker No. 115 Tahun 2019 tentang SKKNI 2 Permenkes No. 460 Tahun 2020 tentang Standar Profesi 3 Permenkes No. 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Kemampuan Khusus: 1 Permenpan No. 6 Tahun 2007 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Gigi 2 Permenkes No. 32 tentang Standar Pelayanan 3 Kepmenaker No. 115 Tahun 2019 tentang SKKNI
217	Teknisi Kesehatan Ikan Pemula	Kompetensi Umum: Peraturan Kelautan dan Perikanan Kompetensi Khusus: 1 Jenis-jenis penyakit ikan 2 Monitoring dan/atau surveilan penyakit ikan 3 Penanganan penyakit 4 Metode pengujian laboratorium 5 Jenis-jenis obat ikan 6 Monitoring lingkungan
218	Teknisi Kesehatan Ikan Terampil	Kompetensi Umum: Peraturan Kelautan dan Perikanan Kompetensi Khusus: 1 Jenis-jenis penyakit ikan 2 Monitoring dan/atau surveilan penyakit ikan 3 Biosecurity 4 Penanganan penyakit 5 Metode pengujian laboratorium 6 Substansi Uji Residu 7 Monitoring lingkungan
219	Teknisi Perkebunrayaan Pemula	1 Bank biji 2 Identifikasi tumbuhan 3 Registrasi 4 Kebun raya 5 Herbarium 6 Konservasi umum 7 Pembibitan 8 Pemeliharaan koleksi
220	Teknisi Perkebunrayaan Terampil	1 Bank biji 2 Identifikasi tumbuhan 3 Registrasi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		4 Kebun raya
		5 Herbarium
		6 Konservasi umum
		7 Pembibitan
		8 Pemeliharaan koleksi
221	Teknisi Transfusi Darah Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
		2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan
		3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
		4 PP No. 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah
		5 Permenkes NO. 83 tahun 2014 tentang UTD, BDRS, dan Jejaring Pelayanan Transfusi
		6 Permenkes No. 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Darah
		7 Permenkes No. 92 Tahun 2015 Tentang Kerjasama antara puskesmas, UTD dan Rumah Sakit dalam Pelayanan Darah untuk menurunkan angka kematian Ibu
		8 Perka BPOM No. 10 Tahun 2017
		9 Etika Profesi TPD
		10 Kode Etik Profesi TPD
		11 Komunikasi Efektif
		12 Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.07.01/MENKES/410/2020
		13 Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.07.01/MENKES/410/2020
		14 SKKNI No. 220 tahun 2020
		Kemampuan Khusus:
		1 Penjaminan Mutu di Bidang Pelayanan Darah
		2 Penyediaan Darah Untuk Transfusi
		3 Pengolahan, dan pengujian Darah
		4 Penyimpanan dan Distribusi Darah
		5 Pemeriksaan Pencocokkan Darah
222	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Permenpan No. 70 Tahun 2021 Tentang JF TPKIP
		2 Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
		3 Permenkes No. 44 Tahun 2018 ttg Penyelenggaraan PKRS
		4 Inpres No. 1 Tahun 2017 tentang GERMAS
		Kemampuan Khusus:
		1 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan
		2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		3 Penggalangan Kemitraan
		4 Advokasi Kesehatan
223	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Pemberdayaan kepada masyarakat tentang GERMAS
		2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi pencegahan penyakit menular
		3 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan
		4 Konsep dasar dan berbagai metode pemberdayaan masyarakat
		5 Prosedur pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat sehat
		6 Konsep dasar dan mekanisme penggalangan kemitraan
		7 Prosedur advokasi kesehatan
		Kemampuan Khusus:
		1 Analisis sasaran
		2 Analisis perilaku
		3 Penyusunan rencana kerja penyuluhan kesehatan
		4 Metode, teknik dan media penyuluhan
		5 Persiapan kegiatan penyuluhan individu/pasien
		6 Penyuluhan kepada kelompok/komunitas
		7 Penyuluhan kepada massa
224	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Pengetahuan umum tentang sanitasi lingkungan
		2 Etika profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan
		Kompetensi Khusus:
		1 Penyehatan media lingkungan
		2 Pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida dan radiasi
		3 Pengendalian faktor resiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit
		4 Penyelenggaraan kesehatan lingkungan pada keadaan tertentu
		5 Manajemen kesehatan lingkungan
225	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Peraturan yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan
		2 Peraturan tentang standar profesi TSL (Tenaga Sanitasi Lingkungan)
		3 Kode Etik Profesi TSL
		4 Pelayanan kesehatan lingkungan
		5 Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL)
		6 Program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		Kemampuan Khusus:
		1 Surveilans Kualitas Media Lingkungan dan Unsur yang Dapat Menimbulkan Gangguan Kesehatan
		2 Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan
		3 Edukasi Kualitas Media Lingkungan dan Unsur yang Dapat Menimbulkan Gangguan Kesehatan
		4 Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Rekayasa Lingkungan
		5 Intervensi Kualitas Media Lingkungan dan Unsur yang Dapat Menimbulkan Penyakit dan Gangguan Kesehatan
		6 Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini, Tanggap Darurat, dan Rehabilitasi Sanitasi Lingkungan pada Kondisi Matra, Perubahan Iklim, dan Ancaman Global
226	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
		3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
		4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut
		5 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/671/2020 tentang Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut
		6 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut
		7 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
		8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan
		9 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1513/2022 tentang Standar Kompetensi Kerja Bidang Terapi Gigi dan Mulut
		10 Pedoman Program Pengembangan Keprofesan Berkelanjutan
		11 Sejarah serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PTGMI
		12 Komunikasi efektif
		13 Penerapan pengambilan keputusan berbasis data
		14 Penerapan belajar sepanjang hayat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
		15 Kewirausahaan
		Kemampuan Khusus:
		1 Konsep Dasar Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
		2 Upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut
		3 Upaya pencegahan penyakit gigi
		4 Pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas
		5 Dental assisting
		6 Manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut
227	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
		3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
		4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut
		5 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/671/2020 tentang Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut
		6 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut
		7 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
		8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan
		9 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1513/2022 tentang Standar Kompetensi Kerja Bidang Terapi Gigi dan Mulut
		10 Pedoman Program Pengembangan Keprofesan Berkelanjutan
		11 Sejarah serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PTGMI
		12 Komunikasi efektif
		13 Penerapan pengambilan keputusan berbasis data
		14 Penerapan belajar sepanjang hayat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
		15 Kewirausahaan
		Kemampuan Khusus:
		1 Konsep Dasar Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
		2 Upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut
		3 Upaya pencegahan penyakit gigi
		4 Pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas
		5 Dental assisting
		6 Manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut
228	Terapis Wicara Terampil	Kompetensi Umum:
		1 Pelayanan terapi wicara yang profesional
		2 Pengembangan diri dalam pelayanan terapi wicara
		3 Komunikasi efektif dalam pelayanan terapi wicara

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRe**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		4 Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan terapi wicara
		5 Kebijakan terkait pelayanan terapi wicara
		6 Pengelolaan Masalah Kesehatan Terapi Wicara
		Kompetensi Khusus:
		1 Pelayanan terapi wicara pada gangguan bahasa
		2 Pelayanan terapi wicara pada gangguan wicara
		3 Pelayanan terapi wicara pada gangguan suara
		4 Pelayanan terapi wicara pada gangguan irama kelancaran
		5 Pelayanan terapi wicara pada gangguan makan dan menelan
229	Widyabasa Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 UU Nomor 24 Tahun 2009
		2 PP Nomor 57 Tahun 2014
		3 Perpres Nomor 63 Tahun 2019
		Kemampuan Khusus
		1 Pemahaman tentang tes kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI)
		2 Penyuntingan dan penyuluhan bahasa
		3 Pemahaman terhadap Ahli Bahasa
		4 Penguasaan literasi
		5 Produk leksikografi
		6 Pemahaman terhadap kaidah Bahasa Indonesia (EYD, TBBI, PUPI)
		7 Perlindungan bahasa dan sastra
		8 Perencanaan peningkatan kompetensi pengajar BIPA
		9 Perencanaan fasilitasi pembelajaran BIPA
		10 Perancangan bahan fasilitasi pembelajaran BIPA
230	Widyaiswara Ahli Pertama	1 Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN
		2 Pembelajaran Orang Dewasa
		3 Rancang Bangun dan Rencana Pembelajaran Mata Pelatihan
		4 Media Pembelajaran
		5 Metode Pembelajaran
		6 E-learning/Pembelajaran Daring
		7 Teknik Komunikasi dalam Pembelajaran
		8 Praktik Mengajar/Micro Teaching
		9 Penyusunan Kurikulum
		10 Penyusunan Modul Pelatihan
		11 Dasar-dasar Karya Tulis Ilmiah (KTI)
231	Widyaprada Ahli Pertama	1 Integritas
		2 Kerjasama
		3 Komunikasi
		4 Orientasi pada Hasil
		5 Pelayanan Publik
		6 Pengembangan Diri dan Orang Lain
		7 Mengelola Perubahan
		8 Pengambilan Keputusan
		9 Perekat Bangsa
		10 Advokasi Kebijakan Pendidikan
		11 Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan
		12 Manajemen Satuan Pendidikan
		13 Pengembangan Model Penyelenggaraan Pendidikan
		14 Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan
		15 Penyusunan Standar Mutu Pendidikan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241126EQDC

